

**STUDI TENTANG SISTEM PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
DI PT. BANK NEGARA INDONESIA DAN PENGARUHNYA TERHADAP
TINGKAT KESEJAHTERAAN PETANI DI KOTA MALANG**

Oleh :

ZAKIA PUTRI SULAIMAN

145040107111031



**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018**

**STUDI TENTANG SISTEM PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT
(KUR) DI PT. BANK NEGARA INDONESIA DAN PENGARUHNYA
TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN PETANI DI KOTA
MALANG**

Oleh:

ZAKIA PUTRI SULAIMAN

145040107111031



**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Pertanian Strata Satu (S-1)**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS PERTANIAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
MALANG
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN**JUDUL**

Oleh:

Judul : Studi tentang Sistem Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di
PT. Bank Negara Indonesia dan Pengaruhnya terhadap Tingkat
Kesejahteraan Petani di Kota Malang

Nama : Zakia Putri Sulaiman

Nim : 145040107111031

Jurusan : Sosial Ekonomi Pertanian

Program Studi : Agribisnis

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Ir. Hendro Prasetyo M.Si

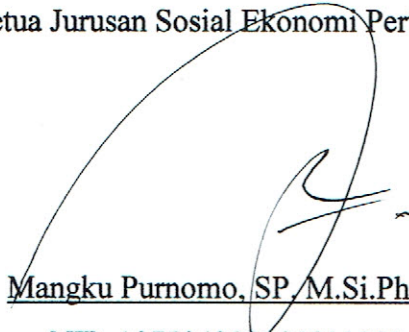
NIP. 195807121989031005

Rini Mutisari, SP., MP

NIP. 2016099005052001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian,


Mangku Purnomo, SP, M.Si, Ph.D.

NIP. 197704202005011001

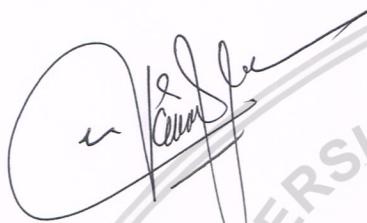
Tanggal Persetujuan:

LEMBAR PENGESAHAN

Mengesahkan

MAJELIS PENGUJI

Penguji I



Destyana Elingga Pratiwi, SP., MP., MBA

NIP. 198712242015042004

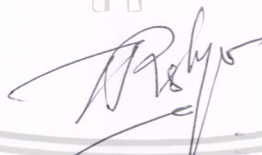
Penguji II



Rini Mutisari, SP., MP

NIP. 2016099005052001

Penguji III



Dr. Ir. Hendro Prasetyo M.Si

NIP. 195807121989031005

Tanggal lulus :

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



Malang, 6 Juli 2018

Zakia Putri Sulaiman

LEMBAR PERUNTUKKAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk dosen saya Dr. Ir. Hendro Prasetyo, M.Si sebagai pembimbing utama dan Rini Mutisari SP., MP sebagai pembimbing pendamping. Saya juga sangat berterimakasih kepada Ibu saya tercinta dan kedua adik saya yang senantiasa mendukung saya dalam mengerjakan skripsi dan saya juga berterimakasih kepada teman-teman saya. Serta berterimakasih kepada BNI KCP UB Malang karena telah memberikan saya izin untuk melakukan penelitian di Bank tersebut.

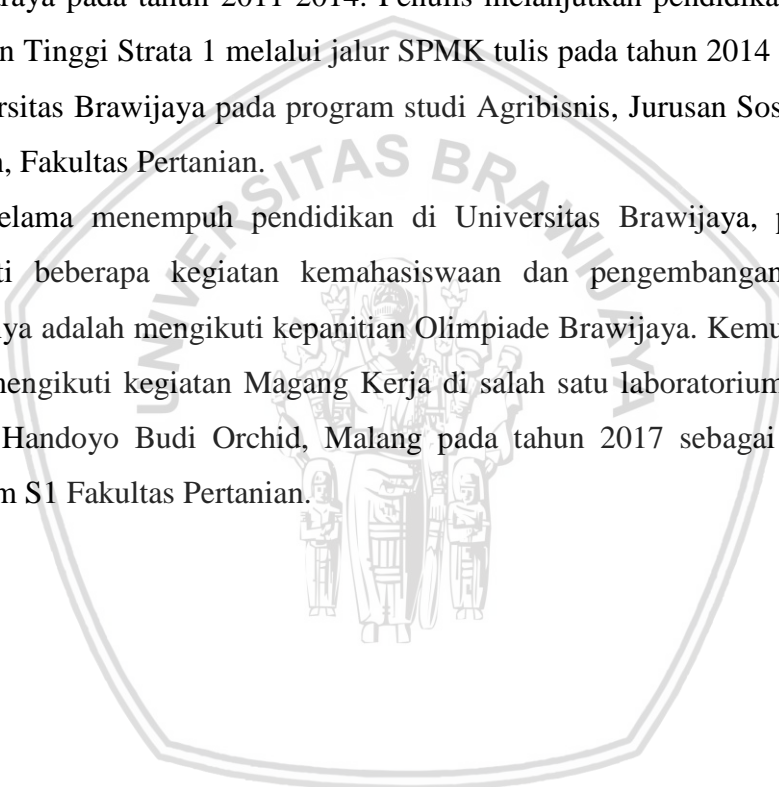


RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Palangkaraya pada tanggal 05 Mei 1996. Lahir dari pasangan suami istri, Bapak Alm. Sulaiman dan Ibu Revi Sunaryati penulis merupakan anak perempuan pertama dari tiga bersaudara.

Penulis menempuh Pendidikan Dasar di SDN 06 Palangka, Palangkaraya pada tahun 2002-2008. Kemudian penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTsN 1 Model Palangkaraya pada tahun 2008-2011. Kemudian penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 Palangkaraya pada tahun 2011-2014. Penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi Strata 1 melalui jalur SPMK tulis pada tahun 2014 dan diterima di Universitas Brawijaya pada program studi Agribisnis, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian.

Selama menempuh pendidikan di Universitas Brawijaya, penulis juga mengikuti beberapa kegiatan kemahasiswaan dan pengembangan kreatifitas, diantaranya adalah mengikuti kepanitian Olimpiade Brawijaya. Kemudian penulis pernah mengikuti kegiatan Magang Kerja di salah satu laboratorium pembibitan anggrek Handoyo Budi Orchid, Malang pada tahun 2017 sebagai bagian dari kurikulum S1 Fakultas Pertanian.



RINGKASAN

ZAKIA PUTRI SULAIMAN. 145040107111031. Studi tentang Sistem Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank Negara Indonesia dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani di Kota Malang. Di bawah bimbingan Dr. Ir. Hendro Prasetyo M.Si sebagai Pembimbing Utama dan Rini Mutisari ,SP.,MP sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini menjelaskan penyaluran KUR BNI yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu nasabah yang usahanya berskala mikro dalam bentuk modal dan menganalisis manfaatnya terhadap tingkat kesejahteraan nasabah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif terhadap BNI KCP UB di Kota Malang sebagai salah satu Bank yang diamanatkan oleh Bank Indonesia dan sebagai salah satu cabang BNI Kota Malang serta pendekatan kuantitatif dari Bappenas untuk meneliti kesejahteraan para petani sebagai nasabah KUR. Penelitian ini menggunakan metode analisis interaktif dan non interaktif serta indikator kesejahteraan dari Bappenas terkait pendapatan, pengeluaran dan tempat tinggal. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi mekanisme dan syarat-syarat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI yang di salurkan kepada petani, menganalisis kendala-kendala yang mempengaruhi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI kepada petani dan menganalisis manfaat KUR terhadap tingkat kesejahteraan petani di Kota Malang dengan menggunakan indikator kesejahteraan menurut Bappenas.

Hasil dari penelitian ini adalah adanya penyaluran pada mekanisme dan syarat-syarat yang tidak sesuai dengan pedoman awal KUR yang dilakukan oleh *bankir*, kendala-kendala terus saja ada di masing-masing pihak Bank maupun nasabah. Pengaruh penyaluran kredit pada penelitian ini dilihat melalui uji rata-rata terhadap tingkat kesejahteraan petani dimana pendapatan, pengeluaran memiliki perbedaan yang meningkat. Kesejahteraan petani di Kota Malang memiliki hasil perbedaan pada pendapatan yaitu sebelum mendapatkan KUR sebesar Rp. 4.442.437. naik menjadi Rp.5.426.812, pengeluaran sebelum mengambil KUR sebesar Rp.2.660.703 naik menjadi Rp.3.146.640. pada kebutuhan daya listrik sebelum mengambil KUR sebesar 642 W menjadi 976 W, air berupa ledeng dan pompa, namun tidak berpengaruh pada tempat tinggal dan MCK. KUR yang telah di programkan pemerintah sudah sangat membantu permodalan bagi usaha kecil dan menengah.

SUMMARY

Zakia Putri Sulaiman 145040107111031 The study on the distribution system of People's Business Credit (KUR) at PT. BANK NEGARA INDONESIA and Its Influence on Farmer Welfare Level in Malang City Under the guidance of Dr. Ir. Hendro Prasetyo M.Si and Rini Mutisari, SP., MP

This study describes the distribution of KUR BNI provided by the government to help micro-scale business customers in the form of capital and analyze the benefits to the level of customer welfare. This research uses qualitative descriptive approach to BNI KCP UB in Malang as one of Bank which mandated by Bank Indonesia and as one of branch of BNI Malang and quantitative approach from Bappenas to examine farmer's prosperity as KUR customer. This research uses interactive and non interactive method of analysis and welfare indicator from Bappenas related. The purpose of this research is to identify mechanism and terms of distribution of BNI People's Business Credit (KUR) distributed to farmers, analyze the constraints affecting the distribution of BNI People's Business Credit (KUR) to farmers and analyze the benefits of KUR to farmers' welfare level in Kota Malang by using welfare indicators according to Bappenas.

The result of this research is the distribution of mechanisms and conditions that are not in accordance with the KUR initial guideline by bankers, the constraints continue to exist in each side of the Bank and customers. The effect of credit distribution in this study is seen through the average test on farmer's welfare level where income, expenditure have increased difference. The welfare of farmers in Malang City has a difference in income before getting KUR of Rp. 4.442.437. rose to Rp.5.426.812, spending before taking KUR amounting to Rp.2.660.703 rose to Rp.3.146.640. on the need for electrical power before taking KUR of 642 W to 976 W, water in the form of plumbing and pumps, but no effect on shelter and toilets. KUR that has been in the government program has been very helpful capital for small and medium enterprises.

KATA PENGANTAR

KUR adalah skema kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) di bidang usaha produktif dan layak (*feasible*), namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan Perbankan. KUR merupakan program pemberian kredit/pembiayaan dengan nilai dibawah Rp 500.000.000 dengan pola penjaminan oleh Pemerintah dengan besarnya *coverage* penjaminan maksimal 80% dari plafon kredit untuk sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, dan industri kecil, dan 70% dari plafon kredit untuk sektor lainnya.

BNI KCP UB Malang mendorong petani kecil menerima bantuan pemerintah lewat Kredit Usaha untuk memanfaatkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Oleh karena itulah, BNI KCP UB Malang memberikan akses yang seluas-luasnya pada petani kecil penerima Kredit Usaha Rakyat. Peneliti berharap agar penelitian ini bermanfaat bagi pihak lembaga keuangan, lembaga pemerintah serta peneliti dimasa mendatang untuk selalu memperbaiki penelitian terkait Studi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat dan Manfaatnya terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani di Kota Malang.

Malang, April 2018

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Tinjauan Teoritis	9
2.2.1 Kredit.....	9
2.2.2 Landasan Hukum Kredit Usaha Rakyat	11
2.2.3 Unsur-unsur Kredit.....	12
2.2.4 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit.....	13
2.2.5 Ketentuan Kredit Usaha Rakyat	14
2.2.6 Tujuan Kredit Usaha Rakyat	15
2.2.7 Masalah yang Dihadapai Usaha Pertanian.....	18
2.2.8 Sistem Penyaluran Kredit Usaha Rakyat.....	19
2.2.9 Tingkat Bunga Kredit Usaha Rakyat	26
2.2.10 Tinjauan Pentingnya Kredit	26
2.2.11 Penelitian Kualitatif.....	29
2.2.11 Penelitian Kuantitatif Tingkat Kesejahteraan Petani	30
III. KERANGKA TEORITIS	43
3.1 Kerangka Pemikiran	43
3.2 Batasan Masalah.....	45
3.3 Proposisi	45
3.3 Defenisi Operasional dan Variabel.....	46
IV. METODE PENELITIAN.....	49
4.1 Pendekatan Penelitian	49

4.2 Penentuan Lokasi dan Waktu Penelitian.....	49
4.3 Teknik Penentuan Responden dan Informan	49
4.4 Teknik Pengumpulan Data.....	51
4.5 Teknik Analisis Data.....	51
4.6 Keabsahan Data.....	54
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	55
5.1 Hasil Penelitian	55
5.1.1 Gambaran Umum BNI 46	58
5.1.2 Profil BNI KCP UB Malang	57
5.1.3 Struktur Organisasi.....	59
5.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi dalam Bidang KUR	60
5.2 Pembahasan.....	62
5.2.1 Mekanisme pemberian KUR Mikro BNI.....	62
5.2.2 Realisasi Penerimaan KUR di Kota Malang.....	93
5.2.3 Kendala-kendala dalam Penyaluran KUR	97
5.2.4 Pengaruh Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)	101
VI. PENUTUP	114
6.1 Kesimpulan	114
6.2 Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN.....	119

DAFTAR GAMBAR

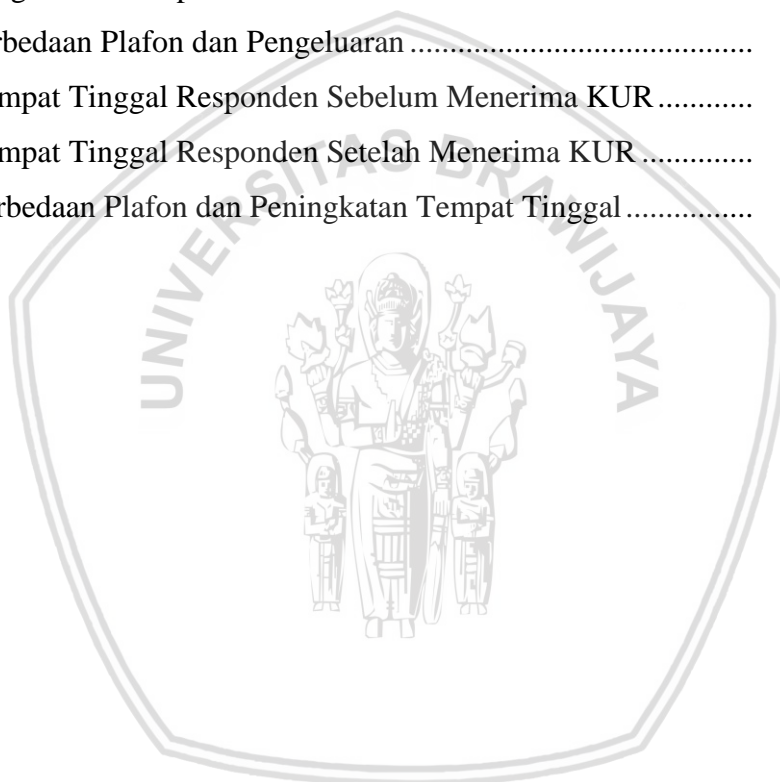
Nomor	Teks	Halaman
1	Mekanisme KUR.....	19
2	Kerangka Pemikiran.....	43
3	Model Analisis Interaktif.....	52
4	Struktur Organisasi.....	59
5	Alur Mekanisme Pemberian KUR.....	62
6	Tahap Permohonan.....	64
7	Grafik Data Target KUR Kota Malang.....	66
8	Tahap Penyelidikan dan Penyidikan	68
9	Tahap Persetujuan	73
10	Tahap Pencairan	88
11	Tahap Pelunasan.....	89
12	Grafik Target KUR Kota Malang	93
13	Diagram Realisasi Penyaluran KUR di Kota Malang.....	95

DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	8
2	Indikator Kependudukan BPS.....	34
3	Indikator Kesehatan dan Gizi.....	35
4	Indikator Pendidikan.....	35
5	Indikator Ketenagakerjaan.....	35
6	Indikator Taraf dan Pola Konsumsi.....	36
7	Indikator Perumahan dan Lingkungan.....	37
8	Indikator Sosial.....	38
9	Defenisi Variabel.....	47
10	Total Realisasi Pinjaman.....	50
11	Cabang BNI Kota Malang Penyalur KUR.....	58
12	Angsuran Pokok dan Bunga Perbulan KUR BNI.....	63
13	Persyaratan Jenis Dokumen.....	63
14	Permohonan Kredit.....	65
15	Data Perkembangan Permohonan KUR BNI 2017.....	66
16	Prosedur Penyelidikan.....	69
17	Prosedur Persetujuan.....	73
18	Pendapatan Responden.....	74
19	Aset Keluarga.....	76
20	Aset Usaha Responden.....	78
21	Pengalaman Kredit Responden.....	80
22	Lama Usaha Responden.....	82
23	Modal Usaha Responden.....	84
24	Lama Pendidikan Responden.....	85
25	Prosedur Pencairan.....	88
26	Prosedur Pelunasan.....	91
27	Wilayah dan Plafon Nasabah KUR.....	95
28	Kendala dalam KUR BNI.....	97
29	Indikator Bappenas.....	101

DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
30	Penggunaan KUR di Kota Malang	102
31	Pendapatan Responden Sebelum Menerima KUR	104
32	Pendapatan Responden Setelah Menerima KUR	104
33	Perbedaan Pendapatan Sesuai Plafon	106
34	Pengeluaran Responden Sebelum Menerima KUR	108
35	Pengeluaran Responden Setelah Menerima KUR	109
36	Perbedaan Plafon dan Pengeluaran	109
37	Tempat Tinggal Responden Sebelum Menerima KUR	111
38	Tempat Tinggal Responden Setelah Menerima KUR	112
39	Perbedaan Plafon dan Peningkatan Tempat Tinggal	112



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pusat Statistika (2011) mengatakan usaha mikro dan kecil di Indonesia memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. 98% perusahaan di Indonesia merupakan usaha mikro dan kecil dan mampu menyumbang 57% Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 60% tenaga kerja. Namun demikian, usaha mikro dan kecil sering menghadapi kendala diantaranya kurangnya informasi maupun akses untuk memperoleh kredit/pembiayaan, sehingga membatasi pertumbuhan dan peluang investasi mereka.

Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pasal 7 dan 8 mengamanatkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek diantaranya terkait pendanaan. Kebijakan pendanaan tersebut ditujukan untuk memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi UMKM pada kredit bank/nonbank, memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya, memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan, dan membantu UMKM mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya dengan jaminan pemerintah.

Manfaat Program KUR adalah untuk meningkatkan dan memperluas akses wirausaha seluruh sektor usaha produktif kepada pembiayaan perbankan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan daya saing UMKM. Total penyaluran KUR tahun 2007-2014 sebesar Rp.178,85 triliun dengan NPL sebesar 3,3%. Tenaga kerja yang berhasil diserap dari program KUR adalah sebanyak 20.344.639 orang. Berdasarkan *workshop* evaluasi KUR dan Rakor Komite Kebijakan KUR pada tanggal 15 Desember 2014, KUR tetap dilanjutkan dengan penguatan regulasi dan perbaikan skemanya.

Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang terdiri dari Bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN mengungkapkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Oktober 2017 di wilayah Jawa Timur telah mencapai 70%. Berdasarkan penuturan Maryono sebagai ketua Himbara, (2016) mengatakan target penyaluran

KUR di Jawa Timur dari 3 Bank (Bank Mandiri, BNI, BRI) tahun ini mencapai Rp. 30 Triliun, sedangkan target secara nasional Rp. 120 Triliun.

BNI Wilayah Malang mendorong petani kecil penerima bantuan Pemerintah lewat skema kartu tani untuk memanfaatkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Berdasarkan penuturan CEO BNI Wilayah Malang Yessy Kurnia, (2017) dan sekitar 200.000 petani pemegang kartu tani di wilayah kerja Bank tersebut. BNI secara nasional akan mendapatkan alokasi KUR sebanyak Rp.13,5 triliun. Angka ini belum dibagi per BNI Wilayah. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang tersebar di seluruh Indonesia merupakan salah satu Bank yang ditunjuk pemerintah untuk menjalankan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), salah satunya BNI Kota Malang. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis mekanisme di Bank BNI.

Kondisi umum pertanian Kota Malang saat ini berdasarkan Dinas Pertanian Kota Malang (2018) telah mencapai keberhasilan dalam Kurun waktu 2013 hingga 2018 yaitu pengembangan sumber daya, sarana dan prasana dengan indikator kinerja yaitu tersedianya rekomendasi sistem pertanian yang efektif untuk 3.303 Ha sawah dan tegalan. Meningkatnya realisasi kemampuan 13.427 anggota kelompok tani dalam berusaha dan terjadi peningkatan kemampuan 79,99%. Lahan tersebut dikembangkan untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan. Tanaman pangan yang dikembangkan saat ini adalah tanaman padi yang dapat ditanam sebanyak 5 kali dalam 2 tahun, tanaman jagung yang dikembangkan pada lahan tegalan dan lahan sawah pada waktu musim kemarau. Potensi lahan pertanian khususnya untuk tanaman meliputi lahan sawah irigasi teknis seluas 1.282 Ha pekarangan rumah dan halaman sekitarnya 6.837 Ha, tegal/kebun 1.660 Ha dan hutan rakyat seluas 167,5 Ha. Kondisi ini mengarahkan KUR untuk membantu permodalan dikarenakan potensi Kota Malang yang terus berkembang terhadap peningkatan kemampuan petani dan UMKM. Kebijakan yang diterapkan pemerintah berupa KUR ini, dimaksudkan untuk mendorong kesejahteraan kepada kondisi yang diharapkan dengan potensi lahan di Kota Malang seperti yang dijelaskan dari data diatas. Pada upaya kesejahteraan rakyat di Kota Malang, Pemerintah berusaha menciptakan suasana ekonomi yang kondusif dengan memberikan kepada pelaku usaha kemudahan

bagi mereka untuk mengembangkan bisnisnya. Hal tersebut mengantarkan kepada pengelola negara untuk memperhatikan secara serius pada usaha berskala mikro.

Alasan-alasan tersebutlah kemudian yang memotivasi penulis untuk meneliti mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai usaha pemerintah dalam memberdayakan sektor pertanian dengan kondisi umum pertanian di Kota Malang saat ini. Selama ini KUR dikenal sebagai kredit tanpa agunan, hal inilah kemudian yang ingin penulis lihat lebih lanjut, yaitu lembaga perbankan khususnya BNI Kota Malang menjalankan sistem KUR, apakah tetap sesuai dengan mekanisme yang diamanatkan oleh BI dan yang telah dijalankan selama ini. Sejalan dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BNI Kota Malang, menunjukkan bahwa adanya permasalahan yang ingin diteliti oleh peneliti dengan menganalisis adanya pengaruh penerimaan KUR sebelum dan sesudah mendapatkan KUR dan mengaitkannya dengan indikator-indikator kesejahteraan yang berhubungan dengan penerimaan KUR untuk usaha pertaniannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis tentang Penyaluran Kredit Mikro di PT. Bank Negara Indonesia KCP UB Malang dan kendala-kendala yang ada dalam penyaluran tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah skema kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM) di bidang usaha produktif dan layak, namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan Perbankan. KUR merupakan program pemberian kredit/pembiayaan dengan nilai dibawah Rp.500.000.000 dengan pola penjaminan oleh Pemerintah dengan besarnya *coverage* penjaminan maksimal 80% dari plafon kredit untuk sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, dan industri kecil, dan 70% dari plafon kredit untuk sektor lainnya. Tujuan program KUR adalah mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Mempercepat pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM), Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM & Koperasi kepada Lembaga Keuangan, sebagai upaya penanggulangan / pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah yang dapat disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme dan syarat-syarat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang di salurkan BNI kepada petani?
2. Apa saja kendala-kendala yang mempengaruhi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI kepada petani?
3. Bagaimana Pengaruh Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani di Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan. Maka yang menjadi tujuan penelitian yaitu untuk:

1. Mengidentifikasi mekanisme dan syarat-syarat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI yang di salurkan kepada petani.
2. Menganalisis kendala-kendala yang mempengaruhi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI kepada petani.
3. Menganalisis manfaat KUR terhadap tingkat kesejahteraan petani di Kota Malang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan antara lain :

1. Memberi manfaat bagi pengembang ilmu manajemen keuangan, dan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain untuk mengadakan penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan kredit khususnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bidang pertanian.
2. Bagi Pemerintah dan Instansi, sebagai masukan dalam pelaksanaan manajemen kredit, sebagai bahan pertimbangan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat, dan sebagai hasil dari gambaran tingkat kesejahteraan petani sebelum dan yang telah mengambil Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BNI.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian dari Linda Mega Sari (2009), dalam sistem pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia sudah memenuhi syarat pengendalian karena mengacu atau sesuai pada Undang-Undang Perbankan Indonesia No.10 tahun 1998 dalam pasal 8, dan dalam komponen struktur pengendalian intern pada PT. Bank Rakyat Indonesia berupa pengendalian lingkungan, penaksiran resiko, informasi dan komunikasi. Aktivitas-aktivitas tersebut telah memenuhi ketentuan dari Bank BRI itu sendiri. Aktivitas pengendalian yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia memenuhi syarat penyaluran. Pemantauan yang terdapat di Bank Rakyat Indonesia dalam sistem pemberian kredit terus meningkat.

Berdasarkan penelitian dari Wahyu Kurniawan (2008), menyatakan bahwa nasabah UMKM tidak menggunakan dana KUR sepenuhnya untuk kegiatan usaha, mereka masih menggunakan dana KUR untuk kegiatan lain seperti konsumsi kegiatan sehari-hari sehingga dapat dikatakan bahwa program KUR ini masih belum memenuhi sasaran dan tujuan awal untuk meningkatkan usaha. Dengan adanya faktor penyalahgunaan dana KUR tersebut, menyebabkan program KUR yang ditujukan bagi UMKM tidak efektif untuk meningkatkan jumlah produksi, pendapatan dan keuntungan dari UMKM.

Berdasarkan Penelitian dari Edinho Ikhtisar Pangihutan Hutagol (2009), dalam penelitiannya menyatakan bahwa diduga semua variabel berpengaruh nyata terhadap pencairan kredit. Jarak lokasi dengan BRI Unit Cigombong tidak berpengaruh nyata terhadap pencairan kredit, karena dianggap bahwa jarak wilayah kecamatan Cigombong yang tidak terlalu luas sehingga memungkinkan untuk dicapai dan diberikan pencairan kredit.

Berdasarkan penelitian dari Nurul Wardhani (2010), menjelaskan bahwa pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat pada BRI Unit Kuwarasan Cabang menjelaskan permasalahan hukum yang timbul atas pemberian Kredit Usaha Rakyat yaitu adanya kredit bermasalah serta ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pihak debitur dan kreditur. Upaya atau tindakan yang dilakukan BRI Unit Kuwarasan Cabang Gombong adalah penagihan secara terus menerus

kepada debitur serta memperketat analisis kredit. Dalam hal kredit macet maka upaya yang dilakukan BRI Unit Kuwarasan Cabang Gombang adalah pengajuan klaim ke Askrindo sesuai dengan nota kesepahaman yang telah disepakati oleh pemerintah, perusahaan penjamin, serta Bank pelaksana karena Kredit Usaha Rakyat ini merupakan program pemerintah sebagai alternatif sumber pembiayaan UMKM untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Dari kondisi tersebut, maka penelitian-penelitian terdahulu dapat dijadikan acuan dalam pengembangan penelitian berikutnya. Hal ini diperlukan karena penelitian-penelitian tersebut saling melengkapi diantara kekurangan-kekurangan yang ada pada masing-masing peneliti.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu ingin mengetahui efektifitas dana KUR digunakan untuk usahanya atau kegiatan lain, penyalahgunaan KUR, pencairan Kredit, dan kredit macet. Kebaharuan dalam penelitian ini adalah untuk mengukur sejauh mana sistem penyaluran Kredit Usaha Rakyat, mendeskripsikan sistem penyaluran KUR, membandingkan dan mengevaluasi KUR yang dilaksanakan di lapangan dan menganalisis manfaat KUR terhadap perekonomian rakyat yang disalurkan Bank BNI dimana Bank BNI menduduki urutan kedua penyalur KUR terbesar setelah BRI namun belum ada yang meneliti penyaluran KUR di Bank BNI.

Tabel 1. Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang

No	Peneliti	Jenis penelitian	Persamaan penelitian	Perbedaan penelitian
1.	Linda Mega Sari (2011)	Kualitatif kuantitatif	Meneliti penyaluran KUR	Meneliti Aktivitas pengendalian dan efektivitas KUR
2.	Wahyu Kurniawan (2008)	Kualitatif	Meneliti manfaat KUR	Meneliti penyalahgunaan dana KUR
3.	Edinho Ikhtisar Pangihutan Hutagol (2009)	Kuantitatif	Meneliti syarat-syarat KUR	Meneliti pencairan kredit
4.	Nurul Wardhani (2010)	Kualitatif	Meneliti sistem KUR	Meneliti kredit macet

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Kredit

Kata Kredit berasal dari bahasa Yunani "*Credere*" yang berarti kepercayaan atau berasal dari bahasa Latin "*Creditum*" yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Jadi, bagian penting dari kredit adalah kepercayaan dari pihak pemberi kredit (Kreditur) percaya bahwa pihak penerima (Debitur) tentang kesanggupan membayar sesuai ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan yang telah disepakati itu berupa barang, uang ataupun jasa.

Pada zaman sekarang ini kebutuhan masyarakat semakin meningkat, akan tetapi dalam pemenuhan kebutuhan bagi sebagian masyarakat merupakan hal yang terkadang sulit untuk dipenuhi, walaupun kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan pokok. Fenomena ini terjadi karena ketidakseimbangan antara jumlah kebutuhan dengan sumber daya dan alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jumlah kebutuhan terus meningkat sedangkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan cenderung terbatas. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dapat mengajukan pinjaman atau kredit ke Bank untuk mendapatkan sokongan dari segi finansial. Berdasarkan UU No. 10/1998 tentang "Perbankan" menyebutkan bahwa kredit adalah sejumlah dana yang disediakan oleh Bank untuk dipinjamkan kepada masyarakat dengan kesepakatan dan dalam jangka waktu tertentu, dimana pinjaman ini nantinya akan dikembalikan dengan ditambah bunga sebagai bentuk balas jasa kepada Bank. Dalam penyaluran kredit yang dilakukan oleh Bank kepada debitur terdapat unsur unsur kredit yang timbul karena ada dua pihak yang saling berkepentingan.

Menurut Teguh Pudjo Muljono (1990:9) kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pembelian atau mengadakan suatu peminjaman dengan janji pembayaran akan dilakukan/ditanggihkan pada suatu jangka waktu yang disepakati. Beragam jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan akan kebutuhan jenis kreditnya.

Secara umum jenis-jenis kredit, antara lain:

1. Kredit Investasi: menurut Kasmir (2005:109), kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Masa

pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan dibutuhkan modal yang relatif besar pula.

2. Kredit Modal Kerja: menurut Kasmir (2005:109) kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
3. Kredit produktif: menurut Kasmir (2005:110), kredit produktif merupakan kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Kredit produktif yaitu kredit yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif dalam arti dapat menimbulkan atau meningkatkan *utility* (faedah/kegunaan).
4. Kredit konsumtif: menurut Kasmir (2005:110), kredit konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.
5. Kredit jaminan
 - a. Kredit dengan jaminan: menurut Kasmir (2005:111), Kredit dengan jaminan merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan calon debitur.
 - b. Kredit tanpa jaminan: menurut Kasmir (2005:111), Kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan Bank atau pihak lain. Menurut Firdaus dan Ariyanti (2004 : 18), kredit dilihat dari segi jaminannya. Kredit tidak memakai jaminan (*unsecured loan*) yaitu kredit yang diberikan benar-benar atas dasar kepercayaan saja, sehingga tidak ada “pengamanan” sama sekali. Kredit ini biasanya terjadi di antara sesama pengusaha (untuk tujuan produktif), atau diantara teman, keluarga, *family* (biasanya untuk tujuan konsumtif).

2.2.2 Landasan Hukum Kredit Usaha Rakyat

Ada beberapa landasan hukum mengenai Kredit Usaha Rakyat, yaitu:

1. Keppres

Keputusan Presiden No. 19 Tahun 2015 "Bahwa dalam rangka percepatan pengembangan akses pembiayaan untuk meningkatkan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, perlu dilakukan perubahan pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah" Keputusan Presiden No. 19 Tahun 2015 sebagai revisi Keputusan Presiden No. 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Ditetapkan pada 15 Juli 2015.

2. Permenko (Menteri Perekonomian)

Permenko No. 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, diundangkan 7 Agustus 15 "Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 19 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam hal pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, perlu diatur Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat".

3. PMK (Peraturan Menteri Keuangan)

Bahwa sesuai dengan Pasal 8 Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015, ketentuan mengenai imbal jasa penjaminan, subsidi bunga dan fasilitas lainnya untuk pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

4. Kepmenko (Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian)

Keputusan Menko Perekonomian No. 170 Tahun 2015 tentang Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin KUR, ditetapkan tanggal 11 Agustus 2015, "Bahwa Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan pemberian Kredit Usaha Rakyat dengan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku

Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengenai Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

5. KMK (Keputusan Menteri Keuangan)

KMK Nomor 1355/KMK.05/2015 tentang Besaran Subsidi Bunga KUR Tahun 2016, “Bahwa dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing produksi dan akses permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Pemerintah perlu memberikan insentif dalam pembiayaan usaha produktif yang diberikan antara lain dalam bentuk subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat.

6. Bank Indonesia/ Bank Sentral

Peraturan Bank Indonesia nomor 17/12/pbi/2015 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia nomor 14/22/pbi/2012 tentang pemberian kredit atau pembiayaan oleh Bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. “Bank Umum wajib memberikan Kredit atau Pembiayaan UMKM. Jumlah Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% yang dihitung berdasarkan rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan”

2.2.3 Unsur-unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung tersebut dalam pemberian kredit adalah (Abdulkadir dan Rilda, 2000:59) :

1. Kepercayaan: Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap permohonan kredit yang akan diberikan itu dapat dikembalikan sesuai dengan persyaratan yang disepakati bersama.
2. Agunan: Setiap kredit yang akan diberikan selalu disertai barang yang berfungsi sebagai jaminan bahwa kredit yang akan diterima oleh calon debitur pasti akan dilunasi dan ini meningkatkan kepercayaan pihak Bank.
3. Jangka Waktu: Pengembalian kredit didasarkan pada jangka waktu tertentu yang layak, setelah jangka waktu berakhir kredit dilunasi.
4. Resiko: Jangka waktu pengembalian kredit mengandung risiko terhalang, atau terlambat, atau macetnya pelunasan kredit, baik di sengaja atau tidak sengaja, resiko ini menjadi beban Bank.

5. Bunga Bank: Setiap pemberian kredit selalu disertai imbalan jasa berupa bunga yang wajib dibayar oleh calon debitur, dan ini merupakan keuntungan yang diterima oleh Bank.

2.2.4 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Menurut Abdulkadir dan Rilda (2000:61), apabila Bank menerima permohonan kredit dari nasabah, Bank perlu melakukan analisis kredit terlebih dahulu. Analisis kredit meliputi:

- a. Latar belakang nasabah/ perusahaan nasabah;
- b. Prospek usaha yang akan dibiayai;
- c. Jaminan yang diberikan
- d. Hal-hal lain yang ditentukan oleh Bank.

Atas dasar hasil analisis kredit, Bank memberikan pertimbangan dengan hati-hati apakah permohonan nasabah tersebut layak untuk dikabulkan. Adapun prinsip-prinsip pemberian kredit konsep 5C (Dahlan Siamat, 1995) :

a. Character (Watak)

Prinsip ini dilihat dari segi kepribadian nasabah. Hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara antara *Customer Service* kepada nasabah yang hendak mengajukan kredit, mengenai latar belakang, kebiasaan hidup, pola hidup nasabah, dan lain-lain. Inti dari prinsip *Character* ini ialah menilai calon nasabah apakah bisa dipercaya dalam menjalani kerjasama dengan Bank.

b. Capacity (Kemampuan)

Prinsip ini adalah yang menilai nasabah dari kemampuan nasabah dalam menjalankan keungan yang ada pada usaha yang dimilikinya. Apakah nasabah tersebut pernah mengalami sebuah permasalahan keuangan sebelumnya atau tidak, dimana prinsip ini menilai akan kemampuan membayar kredit nasabah terhadap Bank.

c. Capital (Modal)

Terkait akan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha. *Capital* dinilai dari laporan tahunan perusahaan yang dikelola oleh nasabah, sehingga dari penilaian tersebut, pihak Bank dapat menentukan layak atau tidaknya nasabah tersebut mendapat pinjaman, lalu seberapa besar bantuan kredit yang akan diberikan.

d. Collateral (Jaminan)

Prinsip ini perlu diperhatikan bagi para nasabah ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak Bank. Jika hal demikian terjadi, maka sesuai dengan ketentuan yang ada, pihak Bank bisa saja menyita aset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan.

e. Condition (Keadaan)

Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor di luar dari pihak Bank maupun nasabah. Kondisi perekonomian suatu daerah atau Negara memang sangat berpengaruh kepada kedua belah pihak, dimana usaha yang dijalankan oleh nasabah sangat tergantung pada kondisi perekonomian baik mikro maupun makro, sedangkan pihak Bank menghadapi permasalahan yang sama. Untuk memperlancar kerjasama dari kedua belah pihak, maka penting adanya untuk memperlancar komunikasi antara nasabah dengan Bank.

Selain penilaian berdasarkan konsep 5C, terdapat juga penilaian kredit terhadap beberapa aspek yang menyangkut kegiatan usaha calon debitur yaitu :

- a. Aspek Pemasaran
- b. Aspek Teknis
- c. Aspek Manajemen
- d. Aspek Yuridis
- e. Aspek Sosial Ekonomi

2.2.5 Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Penyaluran KUR diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.05/2009. Beberapa ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemerintah dalam penyaluran KUR adalah sebagai berikut:

1. UMKM-K yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang *feasible* namun belum *Bankable* dengan ketentuan :
 - a. Merupakan debitur baru yang belum pernah mendapat kredit/pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada saat permohonan kredit/embiayaan

diajukan dan/ atau belum pernah memperoleh fasilitas kredit program dari Pemerintah

- b. Khusus untuk penutupan pembiayaan KUR antara tanggal Nota Kesepakatan Bersama (MoU) Penjaminan KUR dan sebelum addendum I (tanggal 9 Oktober 2007 s.d. 14 Mei 2008), maka fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada debitur yang belum pernah mendapatkan pembiayaan kredit program lainnya
 - c. KUR yang diperjanjikan antara Bank pelaksana dengan UMKM-K yang bersangkutan.
2. KUR disalurkan kepada UMKM-K untuk modal kerja dan investasi dengan ketentuan:
- a. Untuk kredit sampai dengan Rp. 5 juta, tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar atau setara 20-21% efektif pertahun.
 - b. Untuk kredit di atas Rp. 5 juta rupiah sampai dengan Rp. 500 juta, tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar atau setara 12- 13% efektif pertahun.
3. Bank pelaksana memutuskan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

2.2.6 Tujuan Kredit Usaha Rakyat

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, pengertian KUR adalah kredit atau pembiayaan kepada UMKM-K (Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif .

Peran Usaha Mikro dan Kecil selama ini diakui berbagai pihak cukup besar dalam perekonomian Nasional. Beberapa peran strategis Usaha Mikro dan Kecil menurut Bank Indonesia antara lain: jumlahnya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi, menyerap banyak tenaga kerja dan setiap investasi menciptakan lebih banyak kesempatan kerja, memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan barang dan jasa yang

dibutuhkan masyarakat luas dengan harga terjangkau. Dalam posisi strategis tersebut, pada sisi lain Usaha Mikro dan Kecil masih menghadapi banyak masalah dan hambatan dalam melaksanakan dan mengembangkan aktivitas usahanya. Sebenarnya masalah dan kendala yang dihadapi masih bersifat klasik yang selama ini telah sering diungkapkan, antara lain: manajemen, permodalan, teknologi, bahan baku, informasi dan pemasaran, infrastruktur, birokrasi dan pungutan, serta kemitraan.

Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR adalah program yang diberikan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana Bank. Pemerintah memberikan penjaminan terhadap resiko KUR sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh Bank pelaksana. Penjaminan KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM-K pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. KUR disalurkan oleh 7 Bank pelaksana yaitu Mandiri, BRI, BNI, Bukopin, BTN, BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri (BSM).

Tujuan program KUR adalah mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Secara lebih rinci, tujuan program KUR adalah sebagai berikut:

- a. Mempercepat pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK).
- b. Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM & Koperas kepada Lembaga Keuangan.
- c. Sebagai upaya penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

Dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan yang bertujuan meningkatkan Sektor Riil dan

memberdayakan UMKM. Kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKMK mencakup:

1. Peningkatan akses pada sumber pembiayaan
2. Pengembangan kewirausahaan
3. Peningkatan pasar produk UMKM
4. Reformasi regulasi UMKM

Upaya peningkatan akses pada sumber pembiayaan antara lain dilakukan dengan memberikan penjaminan kredit bagi UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada tanggal 5 November 2007, Presiden meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan fasilitas penjaminan kredit dari Pemerintah melalui PT Askrindo dan Perum Jamkrindo. Adapun Bank pelaksana yang menyalurkan KUR ini adalah Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Bukopin.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM yang *feasible* tapi belum *Bankable*. UMKM yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, maksudnya UMKM dan Koperasi dapat langsung mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank pelaksana. Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, maka penyaluran KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung, maksudnya usaha mikro dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau melalui kegiatan *linkage* program lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana.

2.2.7 Defenisi dan Masalah yang Dihadapi Usaha Pertanian/ UMKM Tani

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Menurut Hubeis (2009: 4-6) permasalahan umum yang biasanya terjadi pada UMKM yaitu :

a. Kesulitan pemasaran

Pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan UMKM. Dari hasil studi yang dilakukan oleh James dan Akrasanee (1988) di sejumlah negara ASEAN, menyimpulkan UMKM tidak melakukan perbaikan yang cukup di semua aspek yang terkait dengan pemasaran seperti peningkatan kualitas produk dan kegiatan promosi, sulit sekali bagi UMKM untuk dapat turut berpartisipasi dalam era perdagangan bebas.

b. Keterbatasan Finansial

Terdapat dua masalah utama dalam kegiatan UMK di Indonesia, yakni dalam aspek finansial (mobilisasi modal awal dan akses ke modal kerja) dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan demi pertumbuhan output jangka panjang. Walaupun pada umumnya modal awal bersumber dari modal (tabungan) sendiri atau sumber-sumber informal, namun sumber-sumber permodalan ini sering tidak memadai dalam bentuk kegiatan produksi maupun investasi. Walaupun begitu banyak skim-skim kredit dari perbankan dan bantuan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sumber pendanaan dari sektor informal masih tetap dominan dalam pembiayaan kegiatan UMK.

c. Keterbatasan SDM

Salah satu kendala serius bagi banyak UMK di Indonesia adalah keterbatasan SDM terutama dalam aspek-aspek *entrepreneurship*, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, *engineering design*, *quality control*, organisasi bisnis, akuntansi data *processing*, teknik pemasaran, dan penelitian pasar. Semua keahlian ini sangat dibutuhkan untuk mempertahankan atau memperbaiki kualitas produk, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam produksi, memperluas pangsa pasar dan menembus pasar barang.

d. Masalah Bahan Baku

Keterbatasan bahan baku serta kesulitan dalam memperolehnya dapat menjadi salah satu kendala yang serius bagi banyak UMKM di Indonesia. Hal ini dapat disebabkan harga yang relatif mahal. Banyak pengusaha yang terpaksa berhenti dari usaha dan berpindah profesi ke kegiatan ekonomi lainnya akibat masalah keterbatasan bahan baku.

e. Keterbatasan Teknologi

UMKM di Indonesia umumnya masih menggunakan teknologi yang tradisional, seperti mesin-mesin tua atau alat-alat produksi yang bersifat manual. Hal ini membuat produksi menjadi rendah, efisiensi menjadi Kurang maksimal, dan kualitas produk relatif rendah.

f. Kemampuan Manajemen

Kekurangmampuan pengusaha kecil untuk menentukan pola manajemen yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap pengembangan usahanya, membuat pengelolaan usaha menjadi terbatas.

g. Kemitraan

Kemitraan mengacu pada pengertian berkerja sama antara pengusaha dengan tingkatan yang berbeda yaitu antara pengusaha kecil dan pengusaha besar. Istilah kemitraan sendiri mengandung arti walaupun tingkatannya berbeda, hubungan yang terjadi adalah hubungan yang setara (sebagai mitra kerja).

2.2.9 Tingkat Bunga Kredit Usaha Rakyat

Pada saat ini suku bunga kredit untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) mengalami penurunan. Suku bunga KUR skala mikro yang tadinya sebesar 22 % menjadi 20-21% efektif /tahun atau setara dengan 10-10,5% *flat* per tahun. Untuk tingkat bunga KUR ritel dari 14 % menjadi 12-13% efektif per tahun atau setara dengan 6-6,5%/tahun. Kredit Usaha Rakyat adalah kredit program yang disalurkan menggunakan pola penjaminan dan kredit ini diperuntukkan bagi pengusaha mikro dan kecil yang tidak memiliki agunan tetapi memiliki usaha yang layak dibiayai Bank. Pemerintah mensubsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan tujuan memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

2.2.10 Tinjauan Pentingnya Kredit

Kredit sangat dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan. Kredit memiliki fungsi dan tujuan yaitu:

1. Mencari keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hal tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh Bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup lembaga keuangan tersebut. Jika lembaga keuangan terus menerus rugi, maka besar kemungkinan lembaga keuangan tersebut akan dilikuidasi atau dibubarkan.

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu Pemerintah

Bagi Pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Keuntungan bagi Pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit adalah:

- a. Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan Bank.

- b. Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang masih menganggur.
- c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.
- d. Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan dapat menghemat devisa negara.
- e. Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor. Pemerintah ada menyalurkan kredit untuk membantu petani. Pusat Pembiayaan Pertanian (2009) menyatakan bahwa untuk sektor pertanian penyaluran kredit bertujuan untuk: (1) meningkatkan akses kredit/pembiayaan petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani kepada lembaga keuangan perbankan, (2) mempercepat pertumbuhan sektor riil (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan), (3) mendukung program ketahanan pangan dan program-program lain yang ada di Departemen Pertanian, dan (4) dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di sektor pertanian.

Pemberian kredit melalui perbankan merupakan intervensi pemerintah bagi dunia usaha agar roda perekonomian terus berjalan. Menurut Ellis (1992), bahwa pemberian kredit merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah yang cukup populer untuk sektor pertanian di negara berkembang dengan tujuan: (1) mengatasi kendala kritis yang menghambat produktivitas pertanian, misalnya untuk pembelian sarana produksi, (2) mempercepat proses adopsi teknologi oleh petani, (3) membantu petani kecil mengatasi ketidak mampuan mereka untuk meminjam modal dari sumber keuangan informal dan komersial, dan (4) untuk pemerataan.

Pembangunan ekonomi mempunyai tiga komponen penting yaitu: pertumbuhan ekonomi, perubahan struktur dan pengurangan jumlah kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi dapat ditunjukkan melalui peningkatan produksi (*output*). Peningkatan produksi hanya dapat dicapai melalui penambahan *input* dan

pengelolaan sumberdaya secara efisien maupun penggunaan teknologi baru. Penambahan *input* dan adopsi teknologi baru yang dapat meningkatkan *output* berarti harus meningkatkan penggunaan modal.

Modal yang digunakan dapat bersumber dari modal sendiri atau dari modal pinjaman (kredit). Kredit sangat berperan penting dalam pembangunan pertanian Indonesia. Hastuti (2004), pentingnya kredit terkait dengan tipologi petani yang sebagian besar merupakan petani kecil dengan penguasaan lahan yang sempit sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pemupukan modal. Untuk melakukan pemupukan modal usahatani, salah satu caranya adalah akses terhadap kredit. Peningkatan akses terhadap kredit akan meningkatkan kemampuan petani membeli sarana produksi dan menggunakan teknologi produksi sehingga dapat dicapai peningkatan efisiensi usahatani (Hazarika dan Alwang, 2003). Dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan salah satu pendukung utama pengembangan adopsi teknologi usahatani yang akhirnya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan usahatani. Selain meningkatkan adopsi terhadap teknologi, kredit untuk sektor pertanian seperti Bimas, kredit intensifikasi dan Kredit Usaha Tani (KUT), kredit juga berfungsi efektif sebagai perangkat introduksi. Hubungan adopsi teknologi dengan kredit adalah dengan adanya akses petani terhadap sumber kredit maka diharapkan petani dapat mengalokasikan kredit yang didapatnya untuk mengadopsi teknologi baru yang dapat meningkatkan produktivitas usahatannya.

Kita ketahui bahwa untuk mengadopsi teknologi baru umumnya membutuhkan modal yang besar, maka dengan adanya akses petani terhadap kredit petani dapat mengadopsi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan petani. Maka dapat disimpulkan bahwa kredit usahatani itu penting dan pemberian kredit usahatani harus dilaksanakan dengan efisien sehingga kredit tersedia dan mudah di dapatkan oleh petani. Petani yang dapat mengelola kredit dengan baik, akan dapat mengembalikan kredit tepat waktu. Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan kredit dapat meningkatkan efisiensi usahatani.

Peningkatan efisiensi dapat diukur dari produksi, produktivitas dan pendapatan petani yang meningkat. Pentingnya pembiayaan berupa kredit dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas dan pendapatan ushatani telah

dibuktikan oleh beberapa peneliti, tetapi seperti yang diketahui bahwa sumber kredit dipedesaan beraneka ragam, ada yang berasal dari lembaga keuangan formal (Bank Komersil/Cabang, Bank Komersil/Unit, BPR/BPRS, Koperasi, Pengadaian, Bank Kredit/Desa/LKDP, dan Bantuan BUMN) dan lembaga keuangan non formal (kios sarana produksi pertanian, pengolah hasil pertanian, pedagang hasil pertanian, pelepas uang, Bank Keliling/harian, famili/tetangga dan lainnya) (Hastuti dan Supadi, 2001). Simatupang dan Rachmat (1989) mendukung bahwa permasalahan utama dalam usahatani adalah masalah modal, modal menjadi kendala karena petani semakin kesulitan dalam mengelola usahatani karena harga input terutama harga pupuk terus mengalami kenaikan.

Nizar (2004) menyatakan bahwa kredit usahatani masih sangat diperlukan sebagai tambahan modal kerja petani dalam melaksanakan usahatani terutama kebutuhan pupuk dan bibit, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyaluran dan pengembalian kredit. Maka dengan demikian kredit sangat berperan sebagai pelancar pembangunan pedesaan dan meningkatkan produktivitas dan pendapatan usahatani.

2.2.11 Penelitian Kualitatif

a. Penelitian Kualitatif Interaktif dengan Metode Teori Dasar

Penelitian teori dasar atau yang disebut juga penelitian teori dasar (*grounded theory*) merupakan penelitian yang diarahkan pada penemuan atau menguatkan terhadap suatu teori. Penelitian dilakukan dengan memberikan deskripsi yang terurai, tetapi dari deskripsi tersebut diadakan abstraksi atau interensi sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan yang mendasar yang membentuk prinsip dasar, atau kaidah-kaidah yang berkenaan dengan sesuatu hal yang memperkuat teori yang telah ada. Metode teori dasar dilaksanakan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, diadakan cek ke lapang, studi perbandingan antar kategori, fenomena dan situasi melalui kajian induktif, deduktif dan verifikasi. Metode teori dasar juga membuat kesimpulan dasar yang membentuk prinsip dasar dari suatu teori. Dalam melakukan metode ini, peneliti perlu memilah mana fenomena yang dapat dikatakan fenomena inti dan mana yang bukan untuk dapat diambil dan dibentuk suatu teori.

b. Penelitian Kualitatif Non Interaktif Dengan Metode:

1. Analisis konsep: kajian atau analisis terhadap konsep-konsep penting yang diinterpretasikan pengguna atau pelaksana secara beragam, sehingga banyak menimbulkan ketidakjelasan.
2. Analisis historis: kajian data kegiatan, program, kebijakan yang telah dilaksanakan pada periode lalu dan lebih diarahkan untuk menganalisis peristiwa kegiatan, program, kebijakan, keterkaitan dalam urutan waktu.
3. Analisis kebijakan: kajian analisis berbagai dokumen yang berkenaan dengan kebijakan tertentu, kebijakan otonomi daerah dalam penyaluran KUR, keterkaitan antar dokumen, dampak, dan konsekuensi-konsekuensi positif dan negatif dari kebijakan dan menguji pelaksanaan program dan keefektifannya.

2.2.11. Penelitian Kuantitatif Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani

Kesejahteraan merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2). Kesejahteraan merupakan suatu hal yang bersifat subjektif, sehingga setiap keluarga atau individu di dalamnya yang memiliki pedoman, tujuan, dan cara hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan (BKKBN 1992, diacu oleh Nuryani 2007).

Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (2007) adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga (Bappenas, 2000). Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah. Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan

dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi (Rambe, 2004).

Arthur Dunham dalam Sukoco (1991) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian utama terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas. Pelayanan ini mencakup pemeliharaan atau perawatan, penyembuhan dan pencegahan.

Pendapat lain tentang kesejahteraan sosial diungkapkan pula oleh Friedlander dalam Sukoco (1991) : (*"Social welfare is the organized system of social services and institutions, designed to aid individuals and groups to attain satisfying standards of life and health, and personal and social relationships which permit them to develop their full capacities and to promote their well-being in harmony with the needs of their families and the community"*) Yaitu bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga, yang bermaksud untuk membantu individu-individu dan kelompok agar mencapai standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan petani selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga maupun masyarakat.

Tingkat kesejahteraan merupakan konsep yang digunakan untuk menyatakan kualitas hidup suatu masyarakat atau individu di suatu wilayah pada satu Kurun waktu tertentu. Konsep kesejahteraan yang dimiliki bersifat relatif, tergantung bagaimana penilaian masing-masing individu terhadap kesejahteraan

itu sendiri. Sejahtera bagi seseorang dengan tingkat pendapatan tertentu belum dapat juga dikatakan sejahtera bagi orang lain, Suyanto, (2014). Mosher (1987), menjelaskan bahwa kesejahteraan petani dijelaskan dari beberapa aspek kesejahteraan rumah tangga yang tergantung pada tingkat pendapatan petani.

Badan Pusat Statistik (2014) kesejahteraan rumah tangga adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Dimensi kesejahteraan rakyat disadari sangat luas dan kompleks, suatu taraf kesejahteraan rakyat hanya dapat terlihat melalui suatu aspek tertentu. Indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan, yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.

Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Turunnya pendapatan riil sangat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah dan menengah. Pada masyarakat berpenghasilan rendah, pendapatan yang mereka peroleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*), bahkan kebanyakan mereka sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidup secara layak, sehingga kualitas hidup keluarga dirasakan semakin menurun dan hal ini berdampak negatif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, tidak semua kemiskinan identik dengan ketidaksejahteraan, demikian juga dengan tingkat pendapatan yang tinggi belum mencerminkan tingkat kesejahteraan yang tinggi pula (Subagio et al. 2001). Salah satu indikator kesejahteraan keluarga adalah dengan mengukur besarnya pengeluaran.

Keluarga dengan kesejahteraan lebih baik, mempunyai persentase pengeluaran pangan lebih kecil dibanding keluarga dengan kesejahteraan lebih

rendah. Jika dikaitkan dengan teori kebutuhan, maka pangan merupakan kebutuhan paling utama. Dengan semakin kompleksnya permasalahan taraf kesejahteraan rakyat, maka informasi yang tepat dan pengukuran yang akurat sangat dibutuhkan untuk memperoleh alat ukur yang sesuai dengan kondisi daerah. Berbagai lembaga mengukur taraf kesejahteraan hanya berupa aspek yang dapat diamati dan dapat diukur. Seperti Badan Pusat Statistik misalnya, kesejahteraan rakyat menggunakan batas garis kemiskinan didasarkan pada data konsumsi dan pengeluaran pangan dan non pangan.

Pada umumnya keluarga berpendapatan rendah di Indonesia membelanjakan sekitar 60-80% dari total pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan pangan Sukirman,(1991).

Indikator Kesejahteraan Menurut BAPPENAS:

1. Indikator pendapatan digolongkan menjadi 3 item yaitu:
 - a. Tinggi (> Rp. 10.000.000)
 - b. Sedang (Rp. 5.000.000)
 - c. Rendah (< Rp. 5.000.000)
2. Indikator pengeluaran digolongkan menjadi 3 item yaitu:
 - a. Tinggi (> Rp. 5.000.000)
 - b. Sedang (Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000)
 - c. Rendah (< Rp. 1.000.000)
3. Indikator tempat tinggal yang dinilai ada 5 item yaitu jenis atap rumah, dinding, status kepemilikan rumah, lantai dan luas lantai. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:
 - a. Permanen Kriteria permanen ditentukan oleh kualitas dinding, atap dan lantai. Bangunan rumah permanen adalah rumah yang dindingnya terbuat dari tembok/kayu kualitas tinggi, lantai terbuat dari ubin/keramik/kayu kualitas tinggi dan atapnya terbuat dari seng/genteng/sirap/asbes.
 - b. Semi Permanen, Rumah semi permanen adalah rumah yang dindingnya setengah tembok/bata tanpa plaster/kayu kualitas rendah, lantainya dari ubin/semen/kayu kualitas rendah dan atapnya seng/genteng/sirap/asbes.
 - c. Non Permanen, Sedangkan rumah tidak permanen adalah rumah yang dindingnya sangat sederhana (bambu/papan/daun) lantainya dari tanah dan

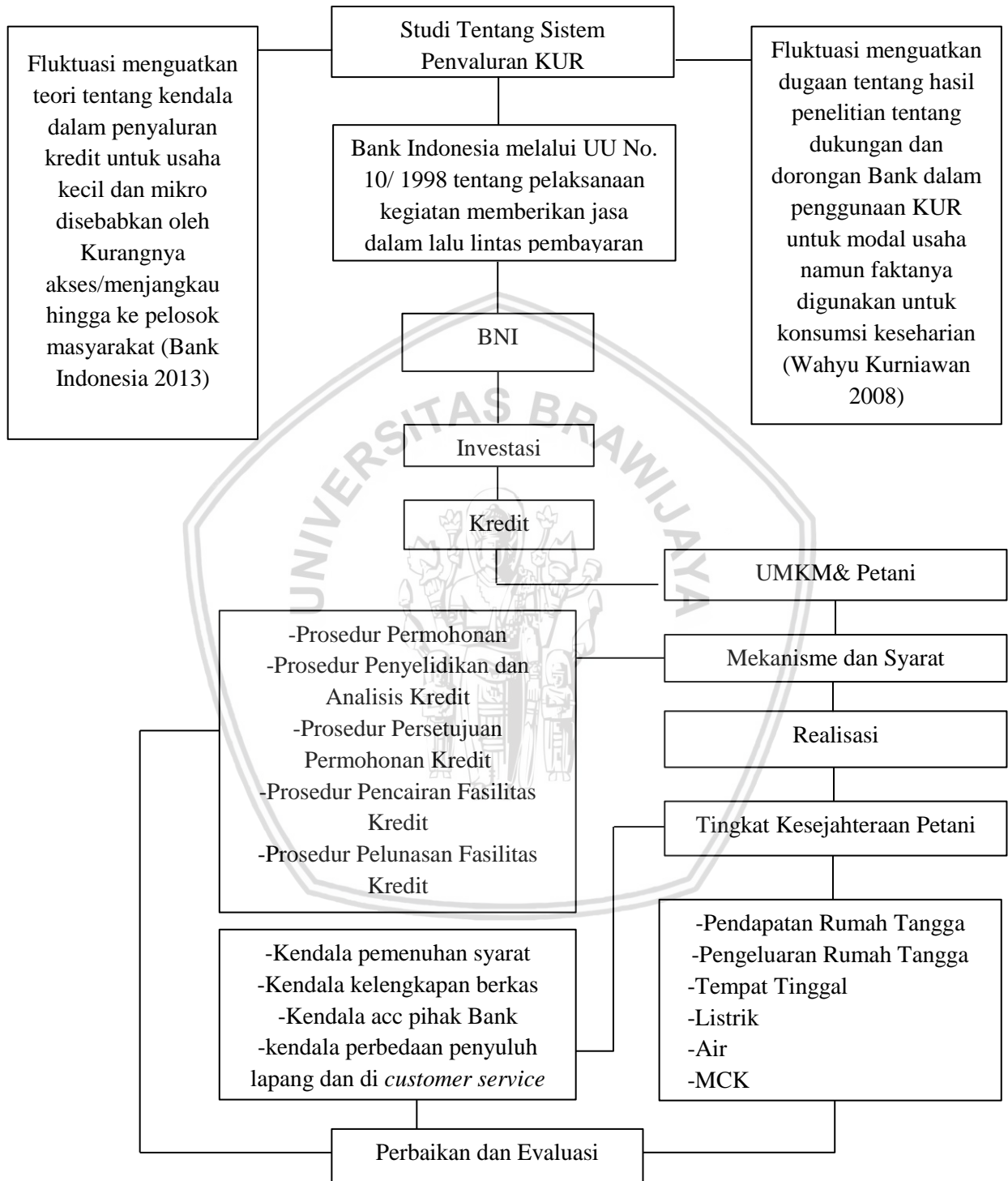
atapnya dari daun-daunan atau atap campuran genteng/seng bekas dan sejenisnya.

4. Indikator fasilitas tempat tinggal yang dinilai terdiri dari 12 item, yaitu pekarangan, alat elektronik, pendingin, penerangan, kendaraan yang dimiliki, bahan bakar untuk memasak, sumber air bersih, fasilitas air minum, cara memperoleh air minum, sumber air minum, fasilitas MCK, dan jarak MCK dari rumah. Dari 12 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:
- a. Lengkap
 - b. Cukup
 - c. Kurang



III. KERANGKA TEORITIS

3.1 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran diatas menjelaskan bahwa perjalanan penyaluran kredit berasal dari Bank Indonesia yang telah di atur oleh Bank Indonesia, UU No.10/1998 yaitu tentang pelaksanaan kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Hasil penelitian dari Wahyu Kurniawan (2008) menguatkan bahwa dukungan dan dorongan Bank dalam penggunaan KUR untuk modal usaha terus ada untuk usaha mikro yang produktif, namun faktanya digunakan untuk konsumsi keseharian. Menurut teori dari BI, fluktuasi menguatkan teori tentang kendala dalam penyaluran kredit untuk usaha kecil dan mikro disebabkan oleh Kurangnya akses/menjangkau hingga ke pelosok masyarakat. Kegiatan pembiayaan tersebut adalah menghimpun dana, sebagai finansial intermediasi dan menyalurkan dana. Menyalurkan dana dalam penelitian ini berfokus pada kredit dimana kredit itu adalah Kredit Usaha Rakyat Bank BNI dengan bentuk investasi, dalam jenis kredit yang disalurkan ke petani dan UMKM.

Penelitian ini berfokus pada Bank BNI dan petani, khususnya dalam penyaluran KUR dan sebagai nasabah dimana prosedur yang diteliti adalah prosedur permohonan, penyelidikan dan analisis kredit, persetujuan, permohonan kredit, pencairan fasilitas kredit, dan pelunasan fasilitas kredit. Pada realisasi, terdapat beberapa variabel yang akan diteliti yaitu kendala pemenuhan syarat, kelengkapan berkas, acc pihak Bank, perbedaan penyuluh di lapang dan di CS. Peneliti ingin mengidentifikasi mekanisme dan syarat-syarat penyaluran KUR yang di salurkan BNI kepada petani dan perkembangannya, kemudian setelah mengetahui syarat-syarat KUR, faktor-faktor apa yang mempengaruhi penyaluran KUR BNI kepada petani, dan mendeskripsikan perkembangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat KUR kepada petani di Kota Malang, yang terakhir adalah menganalisis manfaat penyaluran KUR terhadap kesejahteraan rumah tangga petani di Kota Malang.

3.2 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian dilakukan pada bulan Februari-Maret 2018.
2. Mekanisme dan syarat-syarat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI pada petani hanya di teliti pada periode dimulai dari *Bankir* menginput berkas dan hingga pelunasan.
3. Data perkembangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kota Malang disajikan hanya data nasabah di Kota Malang.
4. Kendala-kendala KUR yang dianalisis hanya ada di petani, mekanisme, dan *Bankir*.
5. Wawancara terkait kesejahteraan petani menggunakan indikator BAPPENAS.

3.4 Defenisi Operasional dan Variabel

Untuk membantu memperjelas data yang harus dikumpulkan dan instrumen yang diperlukan, maka diperlukan pembatasan definisi operasional supaya tidak terjadi perbedaan penafsiran terhadap variabel-variabel penelitian. Dalam penelitian ini terdapat empat definisi operasional sebagai berikut:

- a. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah fasilitas yang diukur melalui tujuan kredit, manfaat kredit, prosedur pengajuan kredit, jumlah kredit yang diterima, jangka waktu kredit dan angsuran kredit.
- b. Penyaluran oleh Bankir BNI di lapang terhadap KUR adalah mekanisme serta syarat-syarat yang digunakan untuk penyaluran KUR dan mempertimbangkan faktor-faktor dalam pemberian/pencairan dana KUR kepada nasabah.
- c. Kendala-kendala dalam penyaluran KUR adalah permasalahan yang muncul dan ketidaksesuaian dengan tujuan awal dalam penyaluran KUR.
- d. Kesejahteraan petani (nasabah) yang mengambil KUR, terdapat peningkatan kesejahteraan adalah perbandingan adanya (perbedaan) penurunan ataukah kenaikan dalam tingkat kesejahteraan setelah mengambil KUR di BNI.

IV. METODE PENELITIAN

4.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Pada pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan metode interaktif dan noninteraktif yang disebut juga penelitian analitis, mengadakan pengkajian berdasarkan analisis dokumen, menghimpun, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengadakan sintesis data, untuk kemudian memberikan interpretasi terhadap konsep, kebijakan, peristiwa yang secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat diamati untuk mengetahui mekanisme dan syarat-syarat penyaluran KUR di tempat penelitian, BNI Kota Malang. Pada pendekatan kuantitatif, penelitian ini menggunakan analisis indikator kesejahteraan dari BAPPENAS yang telah ditentukan variabelnya berupa pendapatan, pengeluaran dan tempat tinggal untuk menentukan tingkat kesejahteraan petani sebelum dan sesudah mengambil KUR.

4.2 Penentuan Lokasi dan Waktu Penelitian

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*) pada PT. Bank Negara Indonesia yang menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terletak di Jalan Veteran Nomor 16, Lowokwaru, Kota Malang. Kegiatan penelitian ini dilakukan mulai bulan Februari sampai bulan Maret 2018.

Pemilihan tempat di BNI Kota Malang dengan pertimbangan:

1. PT Bank Negara Indonesia Kota Malang melayani adanya fasilitas Kredit Usaha Rakyat dengan lokasi strategis dan berdekatan dengan calon nasabah yang menjadi sasaran KUR.
2. Jumlah Debitur KUR BNI terus meningkat.

4.3 Teknik Penentuan Responden dan Responden

Penentuan sampel/responden menggunakan metode *non-probability* sesuai dengan tujuan awal penelitian yaitu agar memperoleh data baik primer dan sekunder dari sumber yang terpercaya yang dapat memberikan informasi dengan jelas dan lengkap. Penentuan responden dalam penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa nasabah telah menjadi debitur KUR dari BNI Kota Malang dan Penelitian ini menggunakan responden yang berfokus pada persoalan

penelitian mengenai mekanisme serta strategi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan mengukur tingkat kesejahteraan petani sebagai nasabah KUR. Berdasarkan teknik penentuan responden yang telah dikemukakan di atas, maka responden yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini adalah:

1. Bankir dari Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
2. Nasabah penerima KUR Mikro dari Bank BNI.

4.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang diambil peneliti merupakan gambaran dari informasi penyaluran KUR pada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) kepada petani yang menurut peneliti diperlukan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data atau fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau melalui penelitian di lapangan yaitu berupa hasil wawancara dengan pihak yang berkompeten yaitu *Bankir* di PT. Bank Negara Indonesia Kota Malang, serta nasabah KUR di Kota Malang sebagai responden. Sumber data primer merupakan sumber data yang berupa keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti yaitu hasil wawancara dengan *Bankir* Bank Negara Indonesia serta nasabah Kredit Usaha Rakyat.

- a. Wawancara: Teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara langsung kepada subjek penelitian. Pihak yang akan diwawancarai adalah 1 *Bankir* dan 64 nasabah KUR
- b. *Questioner*: Variabel *questioner* meliputi variabel mekanisme dan syarat, kendala-kendala KUR dan indikator kesejahteraan menurut BAPPENAS yaitu pendapatan, pengeluaran dan tempat tinggal.
- c. Observasi: Observasi dilakukan dengan mengamati secara menyeluruh mekanisme penyaluran KUR yang dilakukan oleh BNI KCP UB. Observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi tambahan yang dibutuhkan terkait dengan penelitian yang dilakukan.

d. Dokumentasi: Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari beberapa sumber seperti aset usaha, aset keluarga, foto para *Bankir*, wawancara nasabah dan brosur KUR, data jumlah debitur dan plafon yang diambil, serta struktur organisasi.

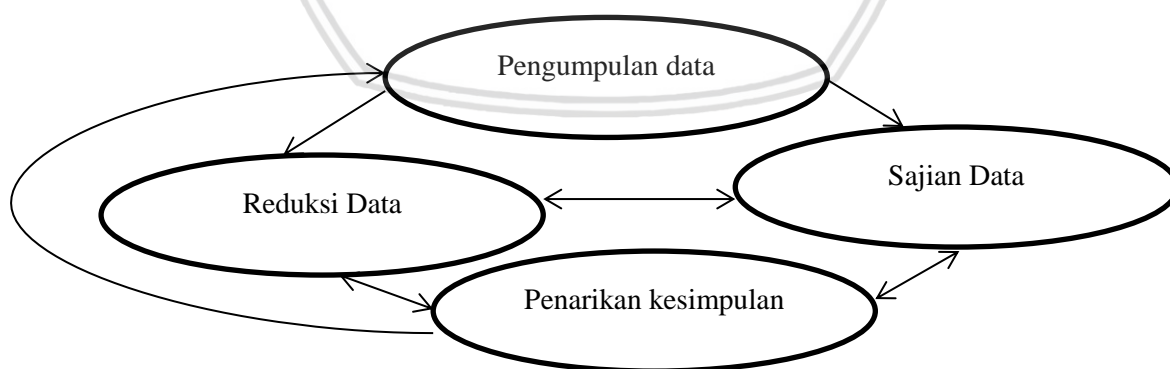
2. Data Sekunder

Data atau fakta atau keterangan yang digunakan secara tidak langsung antara lain data jumlah debitur KUR dan plafon yang diambil, lembar permohonan Kredit Usaha Rakyat di PT. Bank Negara Indonesia Kota Malang, literatur, catatan, karya ilmiah, laporan penelitian, dan sumber lain yang relevan dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer. Terdiri atas lembar permohonan Kredit Usaha Rakyat, kitab Undang-undang hukum perdata, peraturan-peraturan terkait, karya ilmiah, dan literatur yang mendukung.

4.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis model interaktif (*interactive model of analysis*) dan indikator kesejahteraan dari Bappenas. Langkah-langkah analisis model tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Model Interaktif



Gambar 3. Model Analisis Interaktif (HB Sutopo, 2002:96)

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan pada waktu peneliti berada di lapangan maupun setelah kembali dari lapangan. Pada penelitian ini analisis data

telah dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Alur analisis mengikuti model analisis interaktif sebagaimana diungkapkan Miles dan Huberman (2014). Teknis yang digunakan dalam menganalisis data dapat divisualisasikan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Data: Langkah peengumpulan data ini sesuai dengan teknik pengumpulan data yang telah diuraikan di atas, yang terdiri dari wawancara dan studi kepustakaan.
- b. Reduksi data: Proses reduksi data awalnya mengidentifikasi informasi atau data yang berkaitan dengan fokus dan masalah penelitian, selanjutnya membuat penggolongan pada setiap informasi atau data yang diperoleh agar mudah dalam penelusuran data dan proses memilih data yang dibutuhkan. Dalam hal ini, peneliti memilih dan mentranskrip data hasil dokumentasi dan wawancara lalu dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian.
- c. Penyajian data: Menyediakan informasi yang disusun menjadi bentuk penyajian data menggunakan teks naratif, tabel, bagan dan diagram.
- d. Penarikan kesimpulan: Mengorganisasikan data-data yang telah dikumpulkan kemudian dihubungkan antara satu dengan yang lain sehingga mudah ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dan berhubungan terus menerus dengan membentuk suatu siklus.

2. Kesejahteraan Menurut BAPPENAS

- a. Indikator pendapatan digolongkan menjadi 3 item yaitu:
 1. Tinggi (> Rp. 10.000.000)
 2. Sedang (Rp. 5.000.000)
 3. Rendah (< Rp. 5.000.000)
- b. Indikator pengeluaran digolongkan menjadi 3 item yaitu:
 1. Tinggi (> Rp. 5.000.000)
 2. Sedang (Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000)
 3. Rendah (< Rp. 1.000.000)
- c. Indikator tempat tinggal yang dinilai ada 5 item yaitu jenis atap rumah, dinding, status kepemilikan rumah, lantai dan luas lantai. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

1. Permanen Kriteria permanen ditentukan oleh kualitas dinding, atap dan lantai. Bangunan rumah permanen adalah rumah yang dindingnya terbuat dari tembok/kayu kualitas tinggi, lantai terbuat dari ubin/keramik/kayu kualitas tinggi dan atapnya terbuat dari seng/genteng/sirap/asbes.
2. Semi Permanen, rumah semi permanen adalah rumah yang dindingnya setengah tembok/bata tanpa plaster/kayu kualitas rendah, lantainya dari ubin/semen/kayu kualitas rendah dan atapnya seng/genteng/sirap/asbes.
3. Non Permanen, sedangkan rumah tidak permanen adalah rumah yang dindingnya sangat sederhana (bambu/papan/daun) lantainya dari tanah dan atapnya dari daun-daunan atau atap campuran genteng/seng bekas dan sejenisnya.

d. Listrik, Air, dan MCK.

1. Perbedaan besaran penggunaan listrik dalam satuan Watt sebelum dan sesudah Mengambil KUR.
2. Perbedaan penggunaan jenis sumber air sebelum dan sesudah mengambil KUR.
3. Penggunaan jenis MCK sebelum dan sesudah mengambil KUR

4.6 Keabsahan Data

Uji keabsahan melalui triangulasi dilakukan karena dalam penelitian kualitatif untuk menguji keabsahan informasi tidak dapat dilakukan dengan alat uji statistik (Bungin, 2008:205). Terdapat 3 macam yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Dari ketiga macam triangulasi yang ada, maka peneliti memutuskan untuk menggunakan triangulasi sumber, yakni menggunakan beberapa sumber informasi guna menyesuaikan dan memperkuat data, baik dalam metode pengumpulan data yang berbeda (wawancara dan observasi) maupun menggunakan responden pendukung. Untuk hasil penelitian kesejahteraan dilakukan uji rata-rata yaitu pengujian rata-rata dengan sampel besar $n > 30$ melalui aplikasi SPSS.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

5.1.1 Gambaran Umum BNI 46

BNI 46 Didirikan pada tanggal 5 Juli 1946, PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk atau BNI menjadi Bank pertama milik negara yang lahir setelah kemerdekaan Indonesia. Lahir pada masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, BNI sempat berfungsi sebagai Bank sentral dan Bank umum sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2/1946, sebelum akhirnya beroperasi sebagai Bank komersial sejak tahun 1955. Uang Republik Indonesia atau ORI sebagai alat pembayaran resmi pertama yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia pada tanggal 30 Oktober 1946 dicetak dan diedarkan oleh Bank Negara Indonesia. Menyusul penunjukan De Javasche Bank yang merupakan warisan dari Pemerintah Belanda sebagai Bank sentral pada tahun 1949, Pemerintah membatasi peran BNI sebagai Bank sentral. BNI lalu ditetapkan sebagai Bank pembangunan dan diberikan hak untuk bertindak sebagai Bank devisa pada tahun 1950 dengan akses langsung untuk transaksi luar negeri. Kantor cabang BNI pertama di luar negeri dibuka di Singapura pada tahun 1955.

Peranan BNI untuk mendukung perekonomian Indonesia semakin strategis dengan munculnya inisiatif untuk melayani seluruh lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke pada tahun 1960-an dengan memperkenalkan berbagai layanan perbankan seperti Bank Terapung, Bank Keliling, Bank Bocah dan Bank Sarinah. Tujuan utama dari pembentukan Bank Terapung adalah untuk melayani masyarakat yang tinggal di kepulauan seperti di Kepulauan Riau atau daerah yang sulit dijangkau dengan transportasi darat seperti Kalimantan. BNI juga meluncurkan Bank Keliling, yaitu jasa layanan perbankan di mobil keliling sebagai upaya proaktif untuk mendorong masyarakat menabung.

Sesuai dengan UU No.17 Tahun 1968 sebagai Bank umum dengan nama Bank Negara Indonesia 1946, BNI bertugas memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Pelayanan Bank Bocah dilakukan juga oleh anak-anak. BNI kembali mencatat sejarah dengan menjual

saham perdananya kepada masyarakat melalui Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) pada tahun 1996. Berdasarkan sejarah perbankan nasional, BNI menjadi Bank negara pertama yang go-public. Persamaan dengan program divestasi saham pemerintah, BNI menerbitkan saham baru pada tahun 2007 dan 2010 melalui Penawaran Umum Terbatas (*right issue*) dengan memperluas komposisi kepemilikan saham publik menjadi 40%. Meningkatnya kepemilikan publik, BNI dituntut untuk meningkatkan kinerja unggul sehingga dapat memberikan nilai lebih kepada pemegang saham.

Globalisasi juga menuntut industri perbankan untuk selalu meningkatkan kemampuan dalam memberikan solusi perbankan kepada seluruh nasabah. Secara historis BNI focus pada *corporate* Banking yang didukung dengan infrastruktur retail Banking yang kuat. Kini BNI terus berupaya meningkatkan kapitalisasi keduanya menjadi keunggulan BNI. BNI kembali mencatat sejarah dengan menjual saham perdananya kepada masyarakat melalui Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) pada tahun 1996. Berdasarkan sejarah perbankan nasional, BNI menjadi Bank negara pertama yang go-public.

Persamaan dengan program divestasi saham pemerintah, BNI menerbitkan saham baru pada tahun 2007 dan 2010 melalui Penawaran Umum Terbatas (*right issue*) dengan memperluas komposisi kepemilikan saham publik menjadi 40%. Meningkatnya kepemilikan publik, BNI dituntut untuk meningkatkan kinerja unggul sehingga dapat memberikan nilai lebih kepada pemegang saham. Globalisasi juga menuntut industri perbankan untuk selalu meningkatkan kemampuan dalam memberikan solusi perbankan kepada seluruh nasabah. Secara historis BNI *focus* pada *corporate* Banking yang didukung dengan infrastruktur retail Banking yang kuat. Kini BNI terus berupaya meningkatkan kapitalisasi keduanya menjadi keunggulan BNI.

5.1.2 Profil BNI Kota Malang

Bank BNI Kota Malang

Nama Bank : Bank BNI

Kode Bank : 009

Perusahaan : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk

Nomer Kode : 70000006

Alamat Bank: Jl. Veteran No.16, Malang, Kota Malang, Jawa Timur, 65141

Telepon : (0341)551715

Layanan : Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)

Visi dan Misi BNI 46

i. Visi:

Menjadi Lembaga Keuangan yang Unggul dalam Layanan dan Kinerja

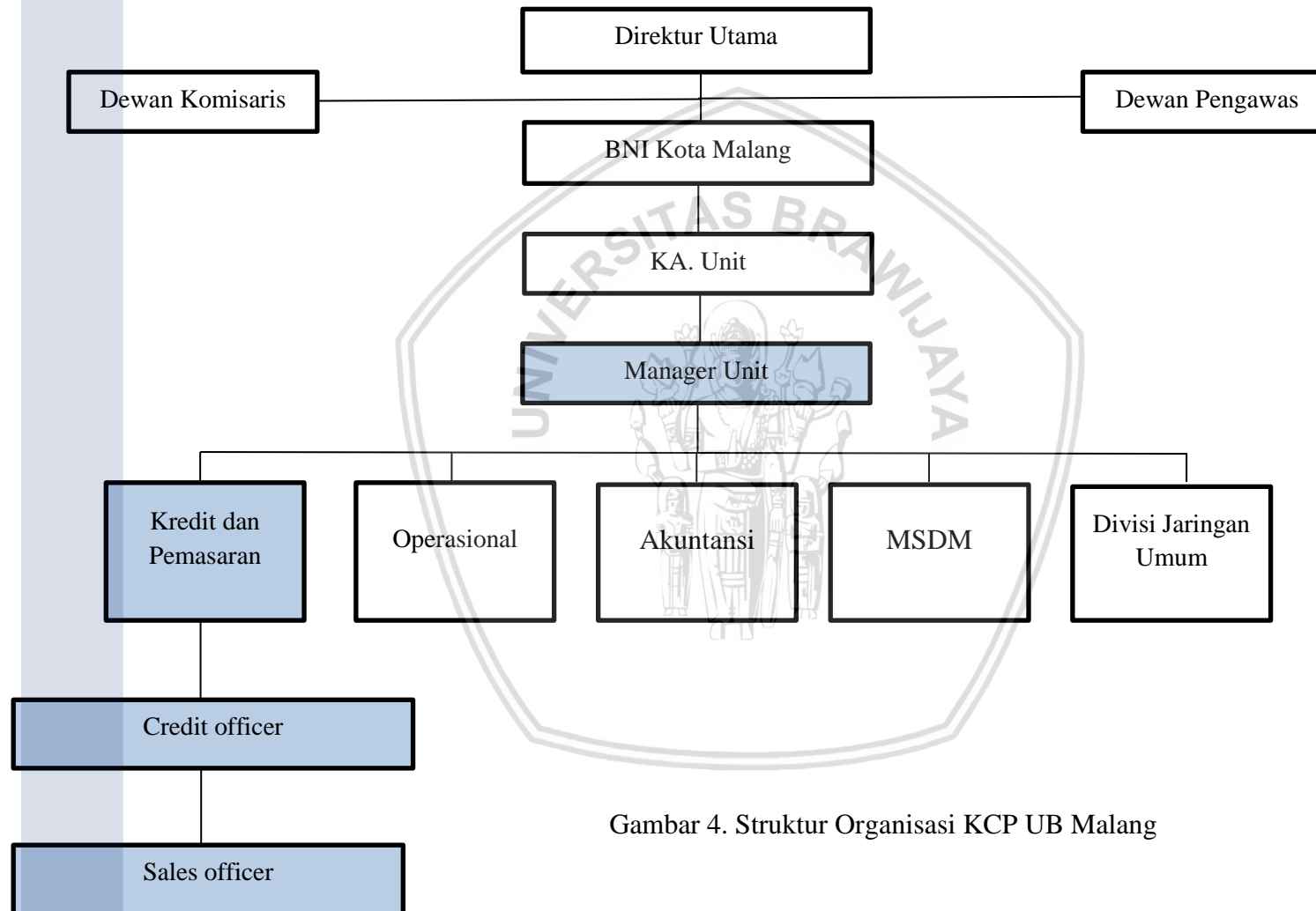
ii. Misi:

1. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada seluruh nasabah, dan selaku mitra pilihan utama.
2. Meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor.
3. Menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan sebagai kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi.
4. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan komunitas.
5. Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik bagi industri.

Tabel 11. Cabang BNI Kota Malang Penyalur KUR

Cabang	Alamat	No. Telp
BNI Blimbing	Ruko De Panorama Square Blok A2 Dan A3 Jl. Jend. A. Yani Sumber Pucung Kota Malang Jawa Timur	Telp: (0341) 483345 Fax.: (0341) 483346
BNI Malang Town Square	Jl. Veteran No. 02 Klojen Kota Malang Jawa Timur	Telp: (0341) 553769 Fax.: (0341) 553768
BNI Pasar Besar	Jl. Pasar Besar No. 151 Sukoharjo Klojen Kota Malang Jawa Timur	Telp: (0341) 362746 Fax.: (0341) 352388
BNI Sawojajar	Jl. Raya Danau Toba G1E 28I-H Sawojajar Kota Malang Jawa Timur	Telp: (0341) 719836 Fax.: (0341) 719835
BNI Soekarno Hatta Malang	Jl. Soekarno Hatta SBC Kav. 2-3 Lowokwaru Kota Malang Jawa Timur	Telp: (0341) 577780 Fax.: (0341) -
BNI Unema Malang	Jl. Surabaya No. 4 Lowokwaru Kota Malang Jawa Timur	Telp: (0341) 580831 Fax.: (0341) 552457
BNI Unibraw Malang	Jl. Veteran No. 16 Lowokwaru Kota Malang Jawa Timur	Telp: (0341) 551527 Fax.: (0341) 551019
BNI Univ. Merdeka	Jl. Terusan Dieng No. 62- 64 Pisang Candi Sukun Kota Malang Jawa Timur	Telp: (0341) 580832 Fax.: (0341) 562583
BNI Univ. Muhammadiyah	Jl. Raya Telogo Mas Km. 8 Lowokwaru Kota Malang Jawa Timur	Telp: (0341) 464976 Fax.: (0341) 462975

5.1.3 Struktur Organisasi



Gambar 4. Struktur Organisasi KCP UB Malang

5.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dalam Bidang KUR

1. Manager Unit

Fungsi :

- a. Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan KUR, pengembangan usaha, kegiatan operasional, pengembangan SDM serta merencanakan dan *memonitoring* target atau pencapaian sasaran usaha yang didasari atas ketentuan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh kantor pusat.

Tugas Pokok:

- a. Mengawasi dan memastikan hasil kerja seluruh unit pada masing-masing bidang di bawahnya telah bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada.
- b. Bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan likuiditas harian sebagai sarana operasional di lingkungan kerja kantor cabang.
- c. Bertanggung jawab terhadap seluruh aset perusahaan yang berada di ruang lingkup kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas.
- d. Melakukan *monitoring* perkembangan neraca harian cabang yang meliputi aset baik pinjaman maupun dana pihak ketiga termasuk kualitasnya.
- e. Memberikan persetujuan sebagai kredit komite dalam hal pemberian fasilitas kredit pelunasan, perkreditan dan hal-hal lain di bidang perkreditan sesuai dengan ketentuan yang ada.

2. Manajer Kredit

Fungsi :

- a. Bertanggung jawab membantu merumuskan dan melaksanakan kebijakan kredit, khususnya segmen *customer* dan retail untuk mencapai perkreditan yang sehat dan menguntungkan serta meminimumkan resiko menggalang penghimpunan dana pihak ke tiga serta memasarkan produk-produk yang dimiliki oleh Bank. Terdiri dari account officer.

Tugas Pokok :

- a. Merumuskan dan merencanakan target market dan sasaran perkreditan Bank sesuai dengan kemampuan internal Bank dengan memperhatikan kondisi pasar.
- b. Bertanggung jawab atas penyusunan program kerja dan anggaran unit kerja yang dipimpinnya.

- c. Memformalisir prosedur persetujuan kredit yang efektif dan efisien namun tetap mempertimbangkan faktor-faktor keamanan dan resiko kredit.
- d. Melakukan review dari portofolio perkreditan dan garansi yang ada.
- e. Melaksanakan program *supervise* kredit secara aktif maupun pasif secara periodik.

3. Credit Officer

Fungsi: Mengelola *credit administration* Kantor Cabang terdiri dari customer service/bankir.

Tugas Pokok:

- a. Menerima berkas dokumen permohonan KUR dari *credit analyst* yang telah disetujui oleh KA unit yang berwenang untuk direalisasikan.
- b. Menyusun dokumen administrasi kredit dan menjadwalkan serta mengelola proses akad kredit.
- c. Memberikan pelayanan kepada nasabah untuk memberikan penjelasan mengenai proses akad kredit.
- d. Menyiapkan proses akad antara Bank dengan calon debitur.
- e. Melakukan *entry data* realisasi kredit dan pembayaran angsuran kredit ke dalam system.
- f. Mengelola pertanggungan asuransi pembiayaan/kredit.

4. Sales Officer

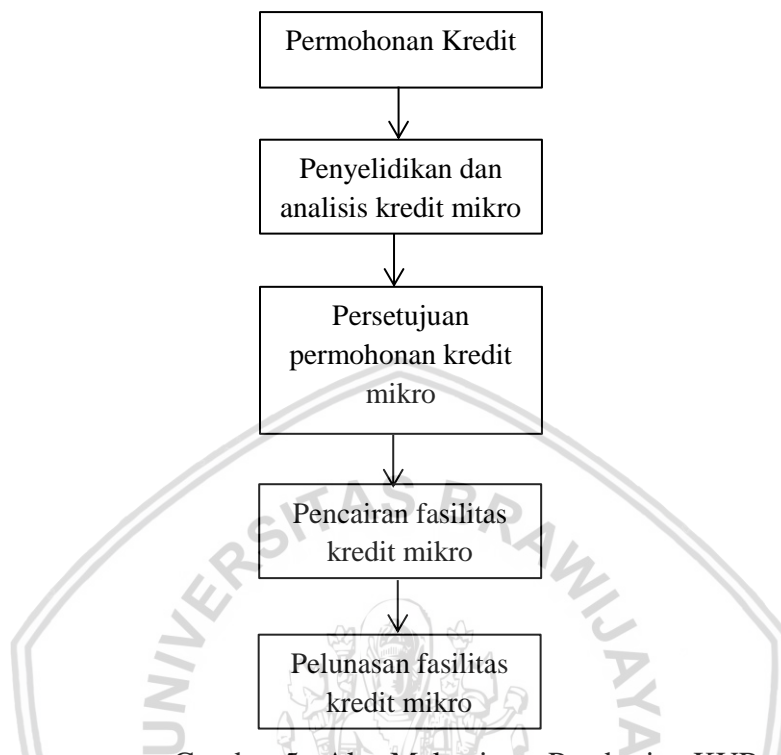
Fungsi: Memasarkan produk unit mikro BNI

Tugas pokok:

- 1. Menawarkan produk KUR kepada rekanan *customer*.
- 2. Memberikan penjelasan KUR kepada nasabah.
- 3. Memberikan solusi atas permasalahan nasabah KUR agar mendapatkan solusi terbaik.
- 4. Menjalin hubungan baik dengan karyawan Bank rekanan serta nasabah KUR.
- 5. Bekerja sama dengan marketing/ personal Banking officer untuk mendapatkan customer KUR.
- 6. Melakukan maintenance terhadap nasabah KUR lama maupun baru.

5.2 Pembahasan Penelitian

5.2.1. Mekanisme pemberian KUR Mikro BNI



Gambar 5. Alur Mekanisme Pemberian KUR

1. Tahap Permohonan kredit

Pada tahap permohonan kredit, KUR Mikro BNI yang dapat diajukan oleh nasabah sebagai pembiayaan pengembangan adalah usaha yang sudah berjalan. Jenis ini diberikan pilihan jangka waktu kredit KUR hingga maksimal 4 tahun. Syarat yang diperlukan berupa: KTP, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Usaha. Jaminan yang digunakan untuk pembiayaan usaha ini adalah usaha yang sedang dijalankan. Nasabah dapat mengajukan pinjaman Maksimal Rp.25 juta untuk jenis kredit mikro. Pinjaman KUR BNI jenis mikro pada tabel diatas akan dipinjamkan dengan debitur dengan pinjaman maksimal Rp.25Juta. Adapun syaratnya yaitu:

- a. Calon debitur merupakan pelaku usaha mikro yang telah menjalankan usahanya minimal selama 6 bulan.
- b. Tenor maksimal diberikan selama 3 tahun/36 bulan untuk jenis kredit modal kerja, dan 4 tahun untuk kredit investasi.
- c. Mengisi formulir pengajuan kredit sesuai ketentuan yang berlaku.

- d. Melengkapi persyaratan dokumen berupa KTP yang masih berlaku, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Usaha.
- e. Jaminan tidak diwajibkan dalam pengajuan KUR Mikro.

Tabel 12. Angsuran Pokok dan Bunga Perbulan KUR BNI

Maksimum kredit	Angsuran Pokok dan Bunga perbulan (Bunga 9% efektif perTahun)				
	12	24	36	48	60
25.000.000	2.186.287	1.142.119	794.993	622.126	518.959
50.000.000	4.372.574	2.284.237	1.589.987	1.244.252	1.037.918
100.000.000	8.745.148	4.568.474	3.179.973	2.488.504	2.075.836
200.000.000	17.490.295	9.136.948	6.359.947	4.977.008	4.151.671
300.000.000	26.235.443	13.705.423	9.539.920	7.465.513	6.227.507
400.000.000	34.980.591	18.273.897	12.719.893	9.954.017	8.303.342
500.000.000	43.725.738	22.842.371	15.899.866	12.442.521	10.379.178

Sumber: BNI 46, KUR Mikro dengan pinjaman maksimal 25 Juta

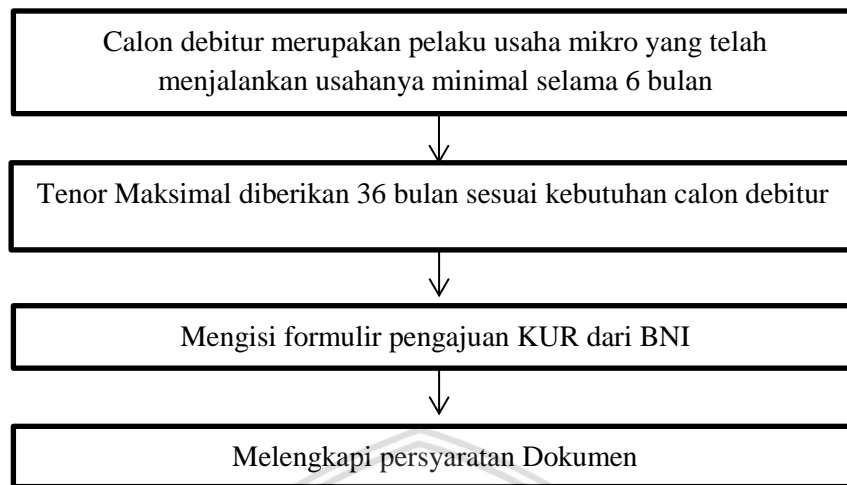
Pada tabel diatas, KUR dalam penelitian ini adalah KUR yang diperuntukkan untuk usaha skala mikro dimana maksimum kreditnya adalah Rp. 25.000.000. persyaratan yang diajukan dalam KUR pada tabel dibawah ini:

Tabel 13. Persyaratan Jenis Dokumen

No	Jenis dokumen	Perorangan	Badan usaha
1.	Fotokopi KTP dan KK	V	V
2.	Fotokopi surat nikah	V	V
3.	Surat izin usaha (SIUP, TDP, SITU, HO) atau keterangan usaha dari kelurahan / kecamatan	V	V
4.	Fotokopi dokumen jaminan untuk kredit di atas Rp 25 juta	V	V
5.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk kredit diatas Rp 50 juta	V	V

Sumber: BNI Kota Malang

Alur Tahap Permohonan:



Gambar 6. Tahap Permohonan

Pada tahap permohonan, dimulai dengan calon debitur memiliki identitas sebagai pelaku usaha mikro dan memiliki surat keterangan telah menjalankan usahanya minimal selama 6 bulan. Lalu, tenor akan diberikan oleh *Bankir/customer service* dengan maksimal 36 bulan. Kemudian nasabah diminta untuk mengisi formulir pengajuan KUR yang telah diberikan kepada debitur dan melengkapi persyaratan dokumen yang telah ditentukan oleh Bank BNI. Perbandingan tahap permohonan yang dilakukan oleh Bank BNI umunya sama dilakukan dengan Bank lainnya seperti BRI, Bank Jatim, Bank Mandiri. Pada tahap permohonan umumnya akan diminta syarat-syarat dan keterangan data diri nasabah serta surat keterangan usaha. Calon debitur harus memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan agar dapat diproses permohonan kreditnya. Pada tahap permohonan kredit mikro, calon nasabah melakukan pengajuan kredit dengan cara datang ke kantor atau di datangi *sales officer*. *Sales officer* melakukan *prescreening*, yaitu:

- a. Kebutuhan calon/debitur (jumlah kredit, jangka waktu kredit, cara pembayaran jumlah pembayaran serta agunan).
- b. Nama usaha, bidang usaha, aktivitas usaha dan alamat usaha.
- c. Lamanya usaha pada tempat tersebut dan ditempat lain.
- d. Aktivitas keuangan misalnya: rata rata tabungan calon/debitur, angsuran kredit/kredit dari pihak lain.

- e. Bagi debitur yang masih dan atau pernah memiliki fasilitas kredit di Bank lain maka dapat menyertakan bukti riwayat/ *track record* kredit di Bank/ lembaga keuangan lain, minimal 6 (enam) bulan terakhir.
- f. Foto Copy dokumen agunan.

Syarat-syarat berkas yang diterima dan diperiksa langsung oleh *Customer Service*, jika lengkap maka berkas akan diinput langsung dan jika belum nasabah harus melengkapinya terlebih dahulu. Setelah *Bankir* menginput maka waktu yang dibutuhkan adalah 1 hari untuk verifikasi semua dokumen yang telah di input dan akan ditindaklanjuti oleh bagian divisi kredit terutama *credit officer*.

Tabel. 14 Permohonan Kredit

No	Jenis dokumen	Diverifikasi oleh	Waktu
1.	Ktp, KK,	<i>Credit officer</i>	1 hari
2.	Surat nikah	<i>Credit officer</i>	1 hari
3.	Surat izin usaha (SIUP, TDP, SITU, HO) atau keterangan usaha dari kelurahan / kecamatan	<i>Credit officer</i>	1 hari
4.	Fotokopi dokumen jaminan	<i>Credit officer</i>	1 hari
5.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk kredit diatas Rp 50 juta	<i>Credit officer</i>	1 hari

Sumber: Data Sekunder BNI Kota Malang

Perhitungan rasio pendapatan terhadap rasio kredit:

$$\frac{\text{Jumlah Hutang/kredit}}{\text{Pendapatan}} \times 100\%$$

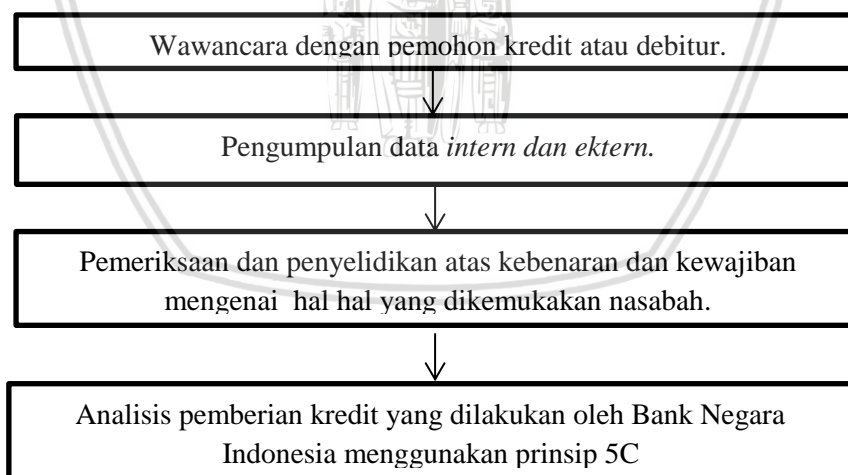
Nilai rasio kredit yang \geq dari rasio pendapatan, peluang untuk mendapatkan fasilitas kredit dari Bank akan sangat kecil. Jumlah ini memiliki resiko yang cukup tinggi sehingga besar kemungkinan Bank akan menolak pengajuan kredit.

Pada pihak Bank kekuatan data sangat dibutuhkan untuk menunjang kepercayaan Bank dalam memberikan kredit ke nasabah namun jika nasabah masih belum bisa memenuhi prosedur ini maka akan ditunggu secepatnya dalam perlengkapan berkas hingga memenuhi syarat dari BNI. Pada penelitian ini

ternyata terdapat pemenuhan prosedur awal lain yang peneliti dapatkan yaitu selain sebelum calon debitur mengajukan kredit, BNI akan langsung melakukan analisa tiga pilar, yakni kemampuan membayar, kemauan membayar dan agunan. Kemudian Bank akan melakukan verifikasi data, yang dimaksud adalah informasi dari Bank lain (apakah terkena *blacklist* dari Bank lain), melakukan wawancara (memastikan calon debitur memenuhi dalam kewajiban pembayaran), verifikasi dokumen (pengecekan KTP sesuai dengan kebenarannya), kemudian *On The Spot* (mengetahui pekerjaan calon debitur, mengetahui tempat kerja/jabatan calon debitur, mengetahui pendapatan gaji calon debitur, mengetahui tempat tinggal calon debitur). Apabila verifikasi data telah memenuhi syarat yang dibutuhkan Bank oleh calon debitur, maka selanjutnya adalah keputusan pihak Bank dalam menentukan calon debitur tersebut apakah disetujui dalam pemberian pinjaman ataupun ditolak.

2. Tahap Prosedur penyelidikan dan analisis kredit mikro

Pada tahap prosedur penyelidikan dan analisis kredit mikro, terdapat dua tahap yaitu tahap penyelidikan dan tahap analisis kredit. Yang termasuk dalam tahap penyelidikan adalah:



Gambar 8. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

- a. Wawancara dengan pemohon kredit atau debitur.
- b. Pengumpulan data *intern dan ektern.*
- c. Pemeriksaan dan penyelidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal hal yang dikemukakan nasabah. Kemudian analisis pemberian kredit yang

dilakukan oleh Bank Negara Indonesia menggunakan prinsip 5C yaitu: *character, capacity, capital, collateral, condition of economic*.

Adapun prosedur analisis yang dilakukan antara lain, mempersiapkan pekerjaan penguraian dari segala aspek baik keuangan maupun non keuangan untuk mengetahui segala kemungkinan dapat tidaknya dipertimbangkan suatu permohonan kredit dan menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi uraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah. Lalu, *Credit officer* melakukan pemeriksaan berkas pengajuan kredit dan verifikasi untuk semua produk kredit. Jika dokumen yang diterima tidak lengkap maka status aplikasi permohonan tidak diregister dan tidak diproses lebih lanjut serta aplikasi permohonan dikembalikan kepada *sales officer* lalu ke nasabah untuk dilengkapi kembali. Kemudian *Credit officer* juga melakukan *BI Checking* dan Daftar Hitam Nasional Bank Indonesia (DHN-BI) kepada calon debitur lainnya yang lolos. Jika lolos maka akan dilanjutkan ke proses survey dan jika tidak lolos maka akan di tolak.

Tabel 16. Prosedur Penyelidikan

No	Tahap	Jenis	Dilaksanakan Oleh	Waktu
1.	Wawancara	Dokumen	<i>Account officer</i>	1-5 hari
2.	Pengumpulan data	<i>Intern dan ekstern</i>	<i>Account officer</i>	1-5 hari
3.	Penyelidikan	5C	<i>Account officer</i>	1-5 hari
4.	Penyusunan laporan	Pertimbangan	<i>Account officer</i>	1-8 hari

Sumber: Data Primer diolah 2018

Pada tahap ini, BNI KCP UB melakukan penyelidikan dilakukan dengan tahap prosedur pemberian kredit dan selanjutnya adalah wawancara yang bertujuan untuk melakukan penyelidikan terhadap calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas yang disampaikan sudah benar sesuai dengan yang diinginkan pihak perbankan. Pada wawancara I, dilakukan wawancara untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hal lain yang dilakukan adalah *On the spot* yang merupakan tahap prosedur pemberian kredit yang berupa kegiatan pemeriksaan ke lapangan untuk melihat prospek kegiatan usaha calon peminjam dan jaminan yang diberikan. Biasanya tahap ini dilakukan

secara spontan tanpa pemberitahuan kepada nasabah. Pada wawancara II, kegiatan yang dilakukan adalah perbaikan berkas, jika ada kekurangan-kekurangan pada saat atau setelah melakukan tahap *on the spot* di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah ada kesesuaian yang mengandung suatu kebenaran.

Pada tahap prosedur penyelidikan ini, *credit officer* akan memperhatikan hal-hal dibawah ini saat penyelidikan berlangsung yaitu:

- a. Prinsip analisis pertama *Character*, maksud dari penilaian terhadap hal ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kemauan dia untuk membayar kewajibannya yang bisa dilihat dari latar belakang debitur, gaya hidup, keadaan keluarga dan lainnya. Pihak Bank dalam menganalisis *character* selain hal di atas tersebut juga melakukan pengecekan di Bank Indonesia atau biasa disebut *BI checking*. *BI checking* ini untuk mengetahui apakah calon debitur memiliki tunggakan pada Bank lain atau terdaftar dalam *black list* Bank Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak Bank BNI, Bank tetap melakukan *BI Checking* terhadap semua calon debitur KUR karena pihak Bank sangat berhati-hati dalam menganalisis debitur, hal ini juga meminimalisir resiko kredit macet nantinya.
- b. Prinsip analisis yang kedua yaitu *capacity*, yaitu untuk mengetahui kemampuan debitur dalam membayar. Pada umumnya untuk menganalisis *capacity* adalah melalui slip gaji atau laporan keuangan, karena calon debitur KUR adalah pihak-pihak yang sebagian besar belum pernah bersentuhan dengan lembaga perbankan maka banyak dari mereka tidak mempunyai laporan keuangan yang baik sehingga dalam hal ini pihak Bank sulit untuk menghitung kemampuan membayar oleh debitur. Akan tetapi penerapan prinsip *capacity* pada BNI telah diterapkan dengan teori yang dikemukakan oleh Kasmir bahwa *capacity* adalah kemampuan debitur dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan.
- c. Prinsip analisis yang ketiga adalah *capital*, yaitu untuk mengetahui dari mana sumber modal yang ada sekarang ini dan untuk mengetahui penggunaan modal tersebut. Karena untuk pembiayaan KUR calon debitur yang ingin membuka usaha baru tidak bisa mengajukan pembiayaan KUR karena pada BNI minimal usaha yang dijalankan adalah 6 bulan. Penerapan prinsip *capital* pada BNI

telah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Kasmir bahwa capital untuk melihat penggunaan modal apakah efektif.

- d. Prinsip analisis yang keempat adalah *collateral*, yaitu jaminan yang diberikan calon debitur. Jaminan pada BNI biasanya berupa sertifikat tanah, BPKB mobil dan kendaraan seperti yang telah dijelaskan oleh nasabah. *Collateral* adalah jaminan yang diberikan calon debitur baik yang bersifat fisik atau non fisik.
- e. Prinsip analisis yang kelima adalah *condition*, yaitu pihak Bank menilai prospek usaha yang dijalani debitur, hendaknya prospek usaha tersebut benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit macet relatif kecil. Penerapan prinsip *condition* telah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Kasmir bahwa *condition* adalah menilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Setelah permohonan dan persyaratan dokumen dan tahapan analisis (wawancara) sudah selesai maka pihak BNI melakukan analisis apakah debitur tersebut layak untuk diberikan pembiayaan.

Selain itu, pada tahap penyelidikan peneliti menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan KUR yang seharusnya. Contohnya ditemukan bahwa agunan/jaminan dilihat sebanyak mungkin oleh *Bankir*, padahal ketentuan KUR sudah menentukan bahwa dibawah Rp. 25 juta tidak perlu adanya jaminan/agunan. Dikarenakan ketidakpercayaan pihak Bank terhadap nasabah maka hal pemeriksaan jaminan itu dilaksanakan.

Menurut Bankir, jika tidak diperiksa dan tidak dilihat secara menyeluruh aset usaha, maka Bank tidak akan percaya untuk memberikan kredit karena menurut penuturan dari Bankir diatas adalah bahwasanya bagaimana bisa memberikan keyakinan untuk membayar 12 bulan selanjutnya jika jaminan tidak dilihat. Penyelidikan yang dilakukan pihak Bankir kepada responden sangat penting dilakukan untuk keberhasilan hingga ke tahap prosedur persetujuan.

3. Prosedur Persetujuan Permohonan Kredit Mikro

Pada tahap prosedur persetujuan permohonan, apabila semua prosedur tidak disetujui maka semua berkas calon debitur dikembalikan, tetapi bila semua prosedur disetujui maka ditindaklanjuti keputusan pembiayaanya. *Manager* akan

memutuskan apakah permohonan pembiayaan calon debitur itu akan diterima atau ditolak. Kemudian adapun prosedur yang diperiksa oleh Kepala Unit (KA.unit) adalah sebagai berikut:

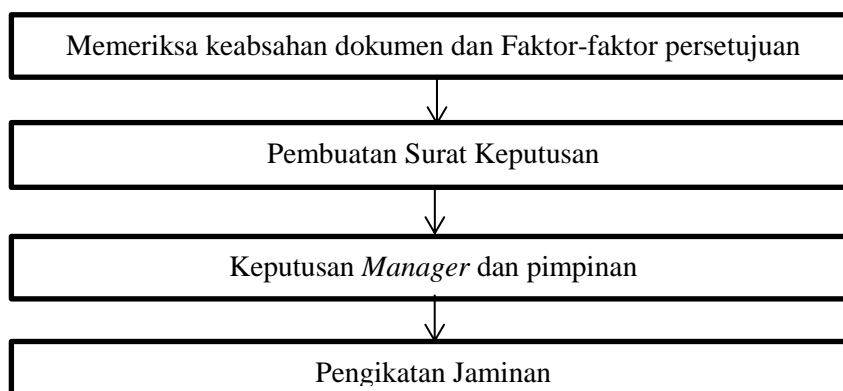
1. Memeriksa keabsahan dokumen jaminan yang biasanya ditentukan berdasarkan penjadwalan wawancara antara pihak debitur dengan pihak analisis kredit mengenai kredit perjanjian/surat keputusan yang berisi: jumlah pinjaman kredit, tujuan penggunaan kredit, jangka waktu kredit yang diajukan, pola angsuran, besarnya kewajiban perbulan (pokok dan bunga), dan aset-aset agunan.
2. Dilakukan pengikatan jaminan yang dilakukan dihadapan notaris.

Tabel 17. Prosedur Persetujuan

No	Tahap	Jenis	Pihak	Waktu
1.	Pemeriksaan dokumen	Dokumen nasabah tahap awal	<i>Account officer</i>	3 hari
2.	Surat keputusan	Pengikatan hutang	<i>Account officer</i>	3 hari
3.	Pengikatan jaminan/agunan	Penginputan agunan	<i>Account officer</i>	3 hari

Sumber: Data Primer diolah 2018

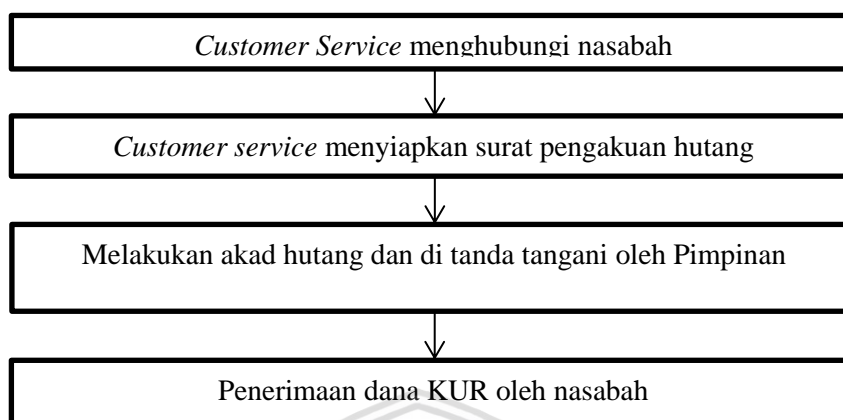
Pada tabel di atas, pemeriksaan dokumen nasabah tahap awal disetujui oleh *account officer* dan diperiksa dalam waktu 3 hari. Kemudian, setelah disahkan keluarlah surat keputusan untuk pengikatan hutang dan dilakukan oleh *account officer* pada saat itu juga. Kemudian, pihak Bank akan mengikat jaminan/agunan dan di labelkan milik Bank sementara hingga prosedur pelunasan selesai.



Gambar 9. Tahap Persetujuan

4. Prosedur Pencairan Fasilitas Kredit Mikro

Alur Tahap Pencairan:



Gambar 10. Tahap Pencairan

Pada tahap prosedur pencairan fasilitas kredit mikro, tahap pencairan kredit mikro yang telah disetujui dimulai dengan *customer service* menghubungi nasabah untuk datang kembali dan *customer service* juga menyiapkan Surat pengakuan hutang (SPH) untuk ditandatangani pada akad kredit oleh nasabah dan menyiapkan kwintansi realisasi kredit untuk pencairan pinjaman kredit. Setelah permohonan pembiayaan KUR disetujui oleh pihak Bank, maka pihak Bank akan membuat surat keputusan pembiayaan untuk diserahkan kepada calon debitur untuk di tanda tangani. Setelah calon debitur menandatangani maka bagian *support* pembiayaan akan menyiapkan akad pembiayaan berupa uang dana KUR dan semua kelengkapan dokumen dan persyaratan yang diperlukan untuk pengikatan agunan. Masa pencairan pembiayaan KUR pada Bank BNI selama 5 hari. Sedangkan masa penerimaan pembiayaan KUR selama 1 hari. Pencairan dapat dilakukan pada hari itu juga pada saat nasabah datang, pencairannya langsung mendatangi bagian *teller*.

Tabel 25. Prosedur Pencairan

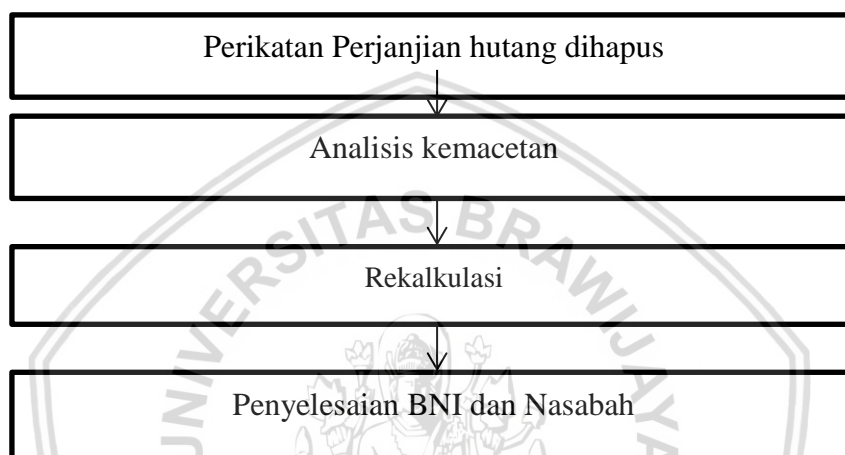
No	Jenis	Pihak	Waktu
1.	Acc pencairan	Kepala unit	5 hari
2.	SPH	Manajer keuangan	5 hari
3.	Penerimaan	Account officer	1 hari

Sumber: Data Primer diolah 2018

Pada tahap prosedur pencairan, acc pencairan dilakukan pada pihak kepala unit dalam waktu persetujuan 5 hari, jika tidak ada maka bisa digantikan manajer kredit dan pemasaran. SPH dilakukan oleh manajer keuangan dalam waktu 5 hari juga dan sekaligus menunggu acc pencairan juga dilakukan pemanggilan kembali untuk penerimaan dilakukan oleh *account officer*.

5. Prosedur Pelunasan Fasilitas Kredit Mikro

Alur Tahap Pelunasan:



Gambar 11. Tahap Pelunasan

Pada tahap prosedur pelunasan, pelunasan kredit yang dilakukan adalah semua hutang debitur terhadap Bank yang akan mengakibatkan hapusnya perikatan perjanjian kredit. Semua kewajiban debitur harus diselesaikan sampai tanggal pelunasan yang meliputi utang pokok dan utang bunga. Ketika debitur sudah mendapatkan dana untuk usahanya, maka tugas pihak perbankan hanya memperhatikan tentang pembayaran bulanan debitur. Jika terjadi kemacetan dalam pembayaran maka langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak perbankan adalah sebagai berikut:

- a. BNI melakukan *restructuring* (perubahan maksimum saldo pembiayaan), *rescheduling* (penjadwalan kembali pembayaran angsuran) dan eksekusi jaminan. *Restructuring* dapat dilakukan dengan cara pihak Bank menambah modal debitur dengan pertimbangan debitur memang membutuhkan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. *Rescheduling* dilakukan dengan penjadwalan ulang dimana pihak Bank dapat memperpanjang jangka waktu

kredit. Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Selain dengan memperpanjang jangka waktu kredit dapat juga dengan memperpanjang jangka waktu angsuran. Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja membuat jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran. Debitur yang dapat diberikan fasilitas ini adalah debitur yang menunjukkan iktikad baik, karakter yang jujur dan mempunyai keinginan untuk membayar.

- b. BNI melakukan *reconditioning* (perubahan ketentuan pembiayaan termasuk jangka waktu pembiayaan) dan penyelesaian melalui jaminan, yaitu klaim ke perusahaan penjamin lalu eksekusi jaminan. *Reconditioning* atau persyaratan ulang dapat dilakukan dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti penundaan pembayaran bunga sampai dengan waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa. Penurunan suku bunga agar lebih meringankan beban debitur. Misalnya jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 22% diturunkan menjadi 20%. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan debitur. Pembebasan bunga yang diberikan kepada debitur dengan pertimbangan debitur sudah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi debitur mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.
- c. Bank akan mengatakan kepada debitur bahwa kredit telah lunas, apakah ingin dipakai lagi atau tidak. Bila debeturnya memakai lagi setelah dilakukan evaluasi oleh analis kredit dan kepala unit (ka.unit) maka Bank akan memperpanjang kreditnya. Namun jika tidak diperpanjang lagi maka Bank harus mengembalikan semua dokumen milik debitur dalam keadaan bersih dan begitu pula Bank akan menerima tanda terima serta memberi tanda kredit lunas.

Pada BNI Kota Malang peneliti menemukan bentuk pencegahan dalam kredit macet yaitu prakarsa kredit, dimana pihak Bank tetap memberikan kesempatan bagi debitur untuk menyelesaikan kreditnya dengan tetap dilakukannya tindakan aktif dari pihak Bank untuk menemui debitur. Dalam proses musyawarah dengan cara pihak Bank mendatangi nasabah langsung ke tempat usahanya lalu dilakukanlah musyawarah dengan mendatangkan staf ahli untuk menemukan titik temu terhadap permasalahan yang dihadapi nasabah. *Monitoring* dilakukan dengan cara penjadwalan secara rutin agar nasabah dapat ditemui serta pihak yang ditugaskan dalam melakukan *monitoring* dapat meninjau debitur sesuai waktu yang dijadwalkan. Analisis dan evaluasi dilakukan dengan cara, dalam hal ini Bank berdasarkan atas prinsip kepercayaan kepada debitur untuk dapat menyelesaikan kredit. dalam tahap analisis dan evaluasi, yaitu diketahui bahwa debitur sebetulnya dilihat mampu untuk memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan kreditnya terhadap pihak Bank oleh karena usaha yang dijalankan oleh debitur masih beroperasi dan pihak Bank menganalisa dari sisi keuangan debitur bahwa prospek usaha debitur dinilai baik, namun debitur dengan sengaja tidak menyelesaikan masalah kreditnya atau dengan sengaja menghindar.

Tabel 26. Prosedur Pelunasan

No	Prosedur	Jenis	Pihak	Waktu
1.	Rekapitulasi bunga	Besarnya bunga	<i>Account officer</i>	Sesuai plafon
2.	<i>Advance payed</i>	Tenor pinjaman	<i>Account officer</i>	Sesuai plafon
3.	Rekalkulasi	<i>Debt to service ratio</i>	<i>Account officer</i>	3-5 hari
4.	Pelunasan maju	Pelunasan maju	<i>Collector</i>	30 hari

Sumber: Data Primer diolah 2018

Prosedur rekapitulasi bunga yang dilakukan adalah menghitung dalam hal besarnya bunga yang dilakukan oleh *account officer* dan dilakukan terhitung sesuai plafon yang diambil oleh nasabah. Metode Rekapitulasi Saldo akan menyinggung masalah metode hitung bunga. Ada tiga metode hitung bunga yang dilakukan, yaitu saldo harian, saldo rata-rata, dan saldo terendah. Metode hitung bunga ini dihitung setiap bulan. Ada dua pilihan periode dalam pencatatan

perhitungan ini, yaitu pada akhir hari atau akhir bulan. Adapun jika akhir hari menggunakan saldo (rekap saldo), sedangkan akhir bulan menggunakan rekap saldo hitung bunga, dan penetapan saldo awal. *Debt to service ratio* dilakukan oleh *account officer* untuk diserahkan ke credit manager lalu *debt collector* akan menghubungi nasabah secara langsung, jika nasabah tidak datang dalam waktu 3-5 hari kerja ke Bank dengan dimulai mengirim surat.

Pada tahap pelunasan, peneliti menemukan adanya nasabah yang memiliki catatan kredit macet, dikarenakan rasio hutang yang melebihi rasio pendapatan. Hal-hal lainnya yang peneliti temukan adalah faktor internal yang berupa penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, dan pengawasan kredit yang lemah. Sedangkan faktor eksternal adalah kegagalan usaha debitur, musibah terhadap debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi, dan masih naiknya suku bunga kredit hingga 9% di tahun 2016. Kelemahan dalam analisa kredit, ini bisa disebabkan oleh berbagai hal diantaranya yaitu lemahnya kebijakan dan SOP analisa kredit, Kurangnya kemampuan pegawai dalam menganalisa kredit dan kurangnya informasi yang diterima Bank. Bank terlalu ekspansif, untuk mengejar target penyaluran kredit, Bank juga masih mengabaikan aspek analisa yang baik atau menurunkan tingkat kehati-hatiannya. Riwayat nasabah menjadi satu-satunya dasar keputusan kredit, sehingga mengabaikan analisa kredit. Bank hanya melihat agunan sebagai dasar keputusan pemberian kredit, sehingga faktor-faktor analisa yang lainnya terabaikan. Realisasi kredit yang tidak tepat waktu, keputusan dan pencairan kredit yang terlalu lama, menyebabkan nasabah tidak dapat mengalokasikan dananya sesuai dengan kebutuhannya. Plafon kredit yang terlalu kecil menyebabkan nasabah tidak dapat menggunakan dananya dengan optimal, sehingga mungkin akan menghambat usahanya. Sedangkan plafon kredit yang terlalu besar menyebabkan nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Pada proses pelunasan inilah yang akan membuat data debitur akan terlihat tetap meningkat atau menurun karena dihitung sebagai pelunasan dan telah selesai mengambil KUR. Sehingga didapat bahwa Fluktuasi pada 5 tahun terakhir, peneliti temukan karena adanya kenaikan suku bunga, 4 tahun sebelumnya yaitu masih 9% hingga 22%. Puncak peningkatan pada tahun 2017 dikarenakan bunga KUR BNI telah turun hingga 7%.

5.2.3 Kendala-kendala dalam Penyaluran KUR

1. Petani yang Dinilai sebagai Usaha yang Beresiko dan Memiliki Prospek Rendah sehingga Dianggap Akan Sulit Mengembalikan Pinjaman dan Bunga Pinjaman

Pada penelitian ini, peneliti meneliti pada pihak petani, dimana petani mengeluh rata-rata petani yang hanya memiliki luas lahan di bawah 0,5 ha, dan secara objektif luasan sebesar ini belum dapat dijadikan sebagai satu-satunya sumber penghasilan petani. Terpencarnya lokasi penguasaan lahan petani. Kadang-kadang petani menguasai lahan di dua atau beberapa tempat. Hal ini menyulitkan dalam pengolahan lahan, penentuan pola tanam, aplikasi teknologi dan manajemen. masih terbatasnya penguasaan iptek yang berkaitan dengan aspek teknis dan manajemen usahatani.

Terbatasnya penguasaan IPTEK ini berakibat tidak saja pada hasil yang tidak optimal tetapi juga pengelolaan usahatani yang tidak profesional. Jumlah petani kecil termasuk di dalamnya petani penggarap dan buruh tani sangat banyak jumlahnya. Secara individu hasil produksi petani juga relatif kecil. Sehingga keuntungan yang dihasilkan juga kecil baik dari kuantitas maupun kualitas. Secara kumulatif karakteristik diatas menyebabkan tetap rendahnya tingkat pendapatan petani.

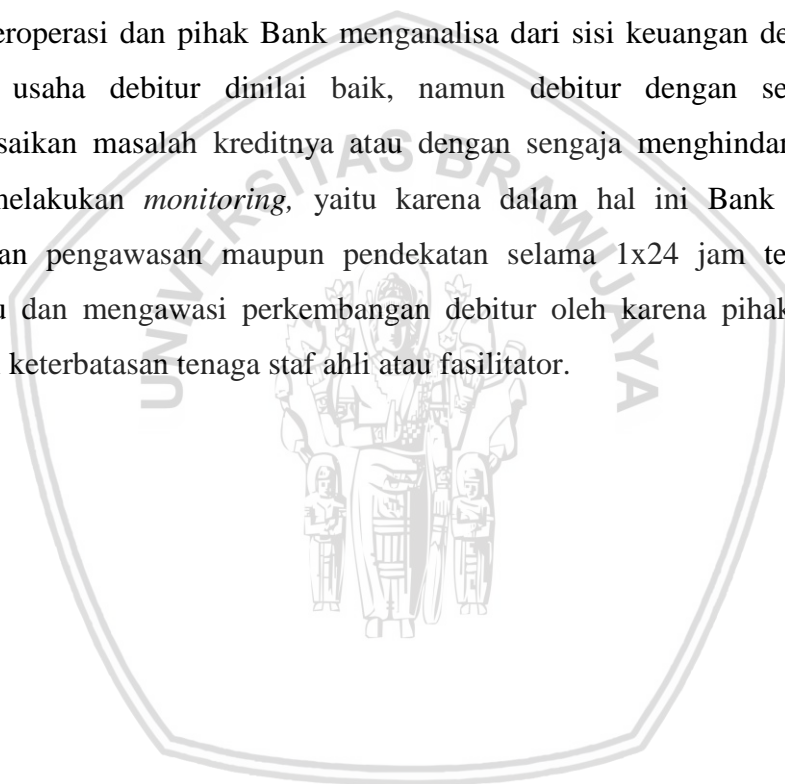
2. Kegagalan Usaha yang Dijalankan oleh Debitur atau Bisa Disebut dengan Usahanya Bangkrut karena Manajemen yang Tidak Baik.

Pada penelitian ini, peneliti meneliti pada pihak *Bankir*, dimana para nasabah seringkali mendapatkan kegagalan dalam usaha yang sudah menjadi kendala umum pada KUR, kendala ini sering terjadi saat usaha sepi dan bahkan tidak ada penghasilan untuk melunasi kredit setiap bulannya. Dalam melakukan negosiasi dengan debitur sulit untuk dimintai persetujuan maupun kerelaan untuk menyerahkan aset jaminannya karena keterbatasan biaya yang dimiliki nasabah contohnya para pengusaha anggrek meminta keringanan waktu untuk melakukan pembayaran angsuran karena masalah usaha yang dihadapinya sehingga satu-satunya aset yang dia miliki adalah tanah namun masih sulit atau disayangkan jika memberikan asetnya.

3. Hambatan dalam Melakukan *Monitoring*

Pada penelitian ini, peneliti meneliti pada pihak manajemen kredit dimana manajemen kredit menjelaskan bahwa tidak dapat melakukan pengawasan maupun pendekatan selama 1x24 jam terus-menerus meninjau dan mengawasi perkembangan debitur oleh karena pihak Bank juga mengerti keterbatasan tenaga staf ahli atau fasilitator.

Hambatan dalam tahap *monitoring* yaitu diketahui bahwa debitur sebetulnya dilihat mampu untuk memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan kreditnya terhadap pihak Bank oleh karena usaha yang dijalankan oleh debitur masih beroperasi dan pihak Bank menganalisa dari sisi keuangan debitur bahwa prospek usaha debitur dinilai baik, namun debitur dengan sengaja tidak menyelesaikan masalah kreditnya atau dengan sengaja menghindar. Hambatan dalam melakukan *monitoring*, yaitu karena dalam hal ini Bank tidak dapat melakukan pengawasan maupun pendekatan selama 1x24 jam terus-menerus meninjau dan mengawasi perkembangan debitur oleh karena pihak Bank juga mengerti keterbatasan tenaga staf ahli atau fasilitator.



2.4 Pengaruh Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani di Kota Malang

Berdasarkan hasil penelitian, umur rata-rata petani responden adalah 23-64 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa petani di lokasi penelitian berada pada usia produktif. Merujuk pada pendapat Mantra (2003), seseorang yang berada pada usia produktif akan memiliki tingkat kemauan dan tanggung jawab yang besar dalam mengembangkan usahanya. Tingkat pendidikan yang dicapai oleh petani responden rata-rata tergolong cukup tinggi, minimal yaitu tamat SMA hingga S2. Soekartawi (2002), berpendapat bahwa petani yang berpendidikan tinggi akan lebih cepat dalam mengadopsi inovasi, dibandingkan dengan petani yang berpendidikan lebih rendah. Terkait dengan jumlah tanggungan keluarga, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga petani di 5 Kecamatan di Kota Malang memiliki tanggungan sebanyak satu sampai enam orang. Pada penelitian ini, jumlah tanggungan rumah tangga petani di Kota Malang termasuk dalam klasifikasi sedang. Guna mencukupi kebutuhan keluarga dan menambah pendapatan rumah tangga, beberapa petani melakukan pekerjaan sampingan di luar pekerjaan utamanya sebagai petani. Pekerjaan sampingan mereka antara lain buruh tani, buruh bangunan, penyewa traktor, ojek motor, pedagang dan pegawai swasta dan guru. Pengaruh KUR terhadap tingkat kesejahteraan petani di Kota Malang yang telah diutarakan oleh para sebagian petani sebagai responden/nasabah KUR BNI dalam memilih untuk menggunakan KUR adalah karena suku bunga rendah, agunan ringan, serta beberapa petani yang ikut hanya karena ketua kelompok tani. Keterbatasan modal merupakan hal yang sering dihadapi oleh petani. Bantuan modal kredit program dari kementerian pertanian berupa KUR yang disalurkan melalui Bank BNI sedikit banyak membantu dalam proses produksi usaha para nasabah.

Tabel. 30 Penggunaan KUR oleh nasabah di Kota Malang

No	Wilayah Petani	Jumlah	Periode	Penggunaan KUR
1.	Tasikmadu	21 Petani	2016-2017	Tenaga kerja
2.	Jatimulyo	3 Petani pedagang	2016-2017	Bahan baku
3.	Buring	2 Petani	2016-2017	Bibit, pupuk, obat
4.	Kedungkandang	9 Petani	2016-2017	Tenaga kerja
5.	Sukun	29 Pedagang	2016-2017	Mesin

Sumber: Data Primer diolah 2018

Kegiatan usaha petani rata-rata menggunakan modal KUR untuk memenuhi sebagian dari bahan baku, bibit, pupuk, obat, mesin dan biaya tenaga kerja luar. Dengan adanya program KUR, petani dapat memperluas usahanya sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani. Di wilayah Tasikmadu, dana KUR digunakan untuk tenaga kerja, di wilayah Jatimulyo dana KUR digunakan untuk penambahan bahan baku, di wilayah Buring dana KUR digunakan untuk bibit, pupuk dan obat, di wilayah Kedungkandang dana KUR digunakan untuk tenaga kerja dan di wilayah Sukun dana KUR digunakan untuk pembelian mesin

Penelitian ini juga peneliti temukan bahwa petani sering terbentur dana saat memulai suatu usaha maupun sedang menjalani suatu usaha, jalan yang ditempuh untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut adalah mengambil kredit pada Bank BNI melalui program KUR, dengan asumsi peranan kredit di gunakan secara produktif seperti pada tabel diatas dimana dana KUR untuk membantu permodalan seperti tujuan utama KUR yang telah dirancang pemerintah dan BI. Semakin banyak jumlah modal maka jumlah produksi semakin banuyak sehingga para nasabah dapat memenuhi produksi yang sebelumnya masih terkendala dengan modal. Lalu, semakin banyak hasil yang diterima pendapatan akan meningkat serta konsumsi rumah tangga juga akan membawa ke tingkat kesejahteraan yang akan semakin meningkat.

Produksi yang baik dengan didukung fasilitas lengkap dan modal disediakan, maka produksi harian dan perencanaan distribusi, termasuk pada produksi akan mudah terpenuhi untuk meningkatkan pendapatan petani sendiri, perencanaan dan prediksi juga turut diperhatikan karena dengan adanya kegiatan produksi yang dihasilkan petani, dari hasil yang baik maka dapat

mengembalikan pinjaman sesuai ketentuan yang ada. Kredit mempunyai peranan yang sangat penting bagi perekonomian untuk mengatasi masalah permodalan.

Kesejahteraan keluarga adalah suatu kondisi keluarga dimana keluarga dapat hidup sewajarnya sesuai dengan lingkungan dengan terpenuhi semua kebutuhannya. Jika keluarga sudah dapat memenuhi kebutuhannya maka keluarga akan mencapai pada kesejahteraannya.

Tiga indikator yang telah diteliti dalam penelitian ini merupakan indikator dari BAPPENAS. Berikut uraiannya:

1. Pendapatan

Dalam memenuhi kesejahteraannya keluarga memiliki tata cara yang berbeda sebagai prioritas yang harus didahulukan. Keluarga dalam menciptakan kesejahteraan keluarga diperlukan manajemen dari pendapatan dan konsumsi rumah tangga yang dijalankan. Penerimaan pendapatan dapat dilakukan dengan kesungguhan dalam menekuni pekerjaan yang digeluti, sehingga dengan pendapatan yang maksimal akan dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan dapat mencapai pada tingkat kesejahteraan keluarga yang diinginkan. Perolehan pendapatan tidak hanya diukur dari besarnya nilai rupiah tetapi nilai upah secara riil yang digunakan sebagai pendapatan dan konsumsi rumah tangga terhadap kesejahteraan keluarga maka kondisi kesejahteraan keluarga dapat tercipta apabila kebutuhan dasar dan pengembangan setiap anggota keluarga dapat terpenuhi, keluarga yang anggota-anggotanya memiliki jiwa keimanan dan ketaqwaan yang tinggi serta keluarga yang memiliki hubungan yang dinamis antar anggota keluarga maupun dengan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dengan 64 responden keluarga sebagai sampel dari petani di Kota Malang diperoleh keterangan bahwa pendapatan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan keluarga. Hal ini dapat dilihat dari wawancara sebelum dan sesudah mendapatkan KUR yang menunjukkan kontribusi pengaruh pendapatan terhadap kesejahteraan keluarga. Hal ini berarti semakin rendah pendapatan yang dimiliki keluarga maka berdampak pada semakin rendah pula kesejahteraan keluarga. Hal tersebut terjadi karena pendapatan yang dimiliki akan berdampak dalam pemenuhan kebutuhan setiap keluarga sehingga ketika pendapatan tidak mencukupi untuk memenuhi

kebutuhan akan mengurangi tingkat kesejahteraan keluarga. Indikator dari BAPPENAS tersebut digunakan atas dasar keterkaitan antara pendapatan, pengeluaran dan tempat tinggal dengan kesejahteraan keluarga.

Tabel 31. Pendapatan Responden Sebelum Menerima KUR

No	Wilayah	Jumlah Responden	Jenis Pendapatan	Rata-rata Pendapatan
1.	Tasikmadu	21	<i>On farm</i>	Rp 4.442.437
2.	Jatimulyo	3	<i>Off farm</i>	
3.	Kedungkandang	2	<i>Off farm</i>	
4.	Buring	9	<i>Off farm</i>	
5.	Sukun	29	<i>Non farm</i>	

Sumber: Data Primer diolah 2018

Pada tabel hasil penelitian yang peneliti dapatkan, pendapatan pada 64 responden sebelum menjadi nasabah KUR telah memiliki rata-rata pendapatan sedang hingga tinggi dimana kriteria ini termasuk indikator sejahtera. Saat peneliti wawancara kepada 64 responden, mereka menjawab bahwa pendapatan mereka memiliki rata-rata Rp.4.442.437,00,- pendapatan ini sudah tergolong sejahtera dimana memiliki kriteria sedang seperti yang dijelaskan oleh Bappenas. Pada 5 kecamatan yang diteliti oleh peneliti, jenis pendapatan on farm, off farm, dan non farm memiliki rata-rata pendapatan Rp. 4.442.437,00,-.

Pengujian mean melalui aplikasi SPSS:

Case Processing Summary						
	Cases					
	Included		Excluded		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
VAR00001	64	100,0%	0	0,0%	64	100,0%

Report		
VAR00001		
Mean	N	Std. Deviation
4442437,5000	64	1889641,58754

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
VAR00001	64	1100000,00	8900000,00	4442437,5000	1889641,58754
Valid N (listwise)	64				

Nilai N menunjukkan jumlah responden sebanyak 64, dan nilai mean sebesar 4442437,5000, yaitu rata-rata pendapatan sebelum mengambil KUR dengan nilai minimum 1100000 dan maksimum 8900000 dan nilai valid responden sebesar 64. Standar deviasi menunjukkan dispersi rata-rata dari sampel.

Tabel 32. Pendapatan Responden Setelah Menerima KUR

No	Wilayah	Jumlah Responden	Jenis Pendapatan	Rata-rata Pendapatan
1.	Tasikmadu	21	On farm	Rp 5.426.812
2.	Jatimulyo	3	Off farm	
3.	Kedungkandang	2	Off farm	
4.	Buring	9	Off farm	
5.	Sukun	29	Non farm	

Sumber: Data Primer diolah 2018

Pada tabel hasil penelitian yang peneliti dapatkan, pendapatan pada 64 responden setelah menjadi nasabah KUR telah memiliki peningkatan rata-rata pendapatan hingga masuk kedalam kriteria tinggi dimana kriteria ini termasuk indikator sejahtera. Saat peneliti wawancara kepada 64 responden, mereka menjawab bahwa pendapatan mereka memiliki rata-rata Rp.5.426.812 setelah menjadi nasabah KUR, pendapatan ini sudah tergolong sejahtera dimana memiliki kriteria tinggi seperti yang dijelaskan oleh Bappenas. Pendapatan responden setelah mengambil KUR rata-rata meningkat menjadi Rp.5.426.812,-

Case Processing Summary						
	Cases					
	Included		Excluded		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
VAR00001	64	100,0%	0	0,0%	64	100,0%

Report		
VAR00001		
Mean	N	Std. Deviation
5426812,5000	64	1924306,53661

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
VAR00001	64	2100000,00	9900000,00	5426812,5000	1924306,53661
Valid N (listwise)	64				

Nilai N menunjukkan jumlah responden sebanyak 64, dan nilai mean sebesar 5426812,500, yaitu rata-rata pendapatan setelah mengambil KUR dengan nilai minimum 2100000 dan maksimum 9900000 dan nilai valid responden sebesar 64. Standar deviasi menunjukkan dispersi rata-rata dari sampel.

Tabel 33. Perbedaan Pendapatan Sesuai Plafon

No	Plafon (Bulan)	Pendapatan
1.	12	<i>Off farm</i>
2.	24	<i>Off farm</i>
3.	36	<i>Non farm</i>

Sumber: Data Primer diolah 2018

Pada tabel hasil penelitian yang peneliti dapatkan, pendapatan pada 64 responden yang menjadi nasabah KUR dan perbedan plafon yang diambil adalah meningkatnya pendapatan sesuai dengan plafon yang diambil. Pekerjaan yang mereka cantumkan pada berkas pengajuan KUR yang akan digunakan dalam pekerjaan itu adalah yang akan diberikan modal KURnya. Pendapatan responden yang mengambil tingkat plafon yang berbeda memiliki nilai persentase yang berbeda pula, dimana kriteria ini termasuk indikator sejahtera. Saat peneliti wawancara kepada 64 responden, mereka menjawab dan peneliti simpulkan bahwa dari pendapatan mereka sebelum dan dibandingkan dengan pendapatan mereka sesudah mengambil KUR sudah tergolong sejahtera. Responden memiliki pendapatan yang termasuk sedang hingga tinggi seperti yang dijelaskan oleh Bappenas. Nasabah yang mengambil plafon 12 bulan adalah nasabah yang baru

saja memulai pengambilan KUR 1 tahun awal yang merupakan petani Tasikmadu, Buring, Dan Kedungkandang. Pada tingkat plafon 24 adalah para pedagang Jatimulyo dan sebagian pedagang kecamatan Sukun yang telah memiliki pengalaman kredit 36 bulan dan peningkatan pendapatannya jauh lebih maju dibandingkan yang mengambil 12 bulan dan 24 bulan. Alasan ini dikarenakan bahwa semakin mengambil KUR dengan jangka waktu yang lama/ dana KUR yang banyak maka peningkatan modal akan memberikan peningkatan pendapatan pula. Maka untuk melihat pengaruh dari modal KUR yang diberikan oleh BNI apakah berpengaruh terhadap rata-rata pendapatan sebelum dan sesudah mendapatkan KUR. Berdasarkan pengujian rata-rata 64 nasabah dengan nilai setelah mendapatkan KUR Rp. 5.426.812 dan sebelum mendapatkan KUR sebesar Rp. 4.442.437. Peningkatan ini menghasilkan kesimpulan bahwa KUR telah memberikan manfaat besar terhadap permodalan yang dibutuhkan para petani dengan dihasilkannya nilai rata-rata pendapatan yang meningkat dari rata-rata pendapatan sebelum mendapatkan KUR. Hasil penelitian sesuai dengan hipotesis yang diajukan, maka hipotesis penelitian diterima. Hasil penelitian juga sesuai dengan penelitian Hendrik (2011) bahwa semakin meningkatnya pendapatan maka akan semakin meningkatnya pula kesejahteraan.

2. Pengeluaran

Pengertian kesejahteraan yang lebih luas dapat dikatakan bahwa kesejahteraan keluarga merupakan suatu keadaan keluarga dengan anggota-anggotanya sudah tercukupi secara lahiriahnya (sandang, pangan, papan dan kesehatan) dan batiniahnya (rasa aman, tenteram, dan nyaman) serta tercukupi kebutuhan pengembangannya. Konsumsi rumah tangga mempunyai peran penting dalam tingkat kesejahteraan keluarga. Dengan cara konsumsi yang efisien dan efektif sesuai dengan pola konsumsi dan perilaku konsumen maka keluarga dapat mencapai pada tingkat kesejahteraan yang tinggi. Untuk mencapai dan mempertahankan kesejahteraan setiap manusia harus berusaha secara terus-menerus dalam batas waktu yang tidak dapat ditentukan, sesuai dengan tuntutan hidup yang selalu berkembang tanpa batasan waktu.

Berdasarkan hasil penelitian dari 64 nasabah sebagai sampel dari petani di Kota Malang diperoleh hasil bahwa pengeluaran/konsumsi rumah tangga nasabah

KUR berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga. Pengeluaran keluarga nasabah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengeluaran untuk kebutuhan pangan dan nonpangan. Pengeluaran pangan meliputi tindakan konsumsi terhadap bahan pangan kelompok padi-padian, ikan, daging, telur, sayuran, kacang-kacangan, minyak, lemak, dan buah-buahan. Sementara itu, pengeluaran nonpangan meliputi biaya untuk perumahan, bahan bakar, penerangan dan air, barang dan jasa, pakaian dan barang-barang tahan lama lainnya. Rata-rata pengeluaran keluarga, terutama pada keluarga miskin masih didominasi untuk pengeluaran pangan. Teori Engel menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan maka persentase pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi pangan akan mengalami penurunan khusus untuk pangan. Pada penelitian ini perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah bahwa pengeluaran untuk pangan semakin kecil, namun non pangan semakin meningkat dengan perbandingan pendapatan yang semakin meningkat pula. Dengan demikian penelitian ini dapat diterima sesuai dengan penjelasan diatas.

Tabel 34. Pengeluaran Responden Sebelum menerima KUR

No	Wilayah	Jumlah Responden	Rata-rata pengeluaran
1.	Tasikmadu	21	Rp. 2.660.703
2.	Jatimulyo	3	
3.	Kedungkandang	2	
4.	Buring	9	
5.	Sukun	29	

Sumber: Data Primer diolah 2018

Pada tabel hasil penelitian yang peneliti dapatkan, rata-rata pengeluaran pada 64 responden sebelum menjadi nasabah KUR telah memiliki pengeluaran Rp.2.660.703 dimana kriteria ini termasuk indikator sejahtera. Saat peneliti wawancara kepada 64 responden, mereka menjawab bahwa pengeluaran mereka dan peneliti simpulkan sudah tergolong sejahtera dimana memiliki kriteria sedang hingga tinggi.

Pengujian pada aplikasi SPSS:

Case Processing Summary						
	Cases					
	Included		Excluded		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
VAR00001	64	100,0%	0	0,0%	64	100,0%

Report		
VAR00001		
Mean	N	Std. Deviation
2660703,1250	64	1318949,75872

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
VAR00001	64	850000,00	6740000,00	2660703,1250	1318949,75872
Valid N (listwise)	64				

Nilai N menunjukkan jumlah responden sebanyak 64, dan nilai mean sebesar 2660703,1250 yaitu rata-rata pengeluaran sebelum mengambil KUR dengan nilai minimum 970000 dan maksimum 6700000 dan nilai valid responden sebesar 64. Standar deviasi menunjukkan dispersi rata-rata dari sampel.

Tabel 35. Pengeluaran Responden Setelah Menerima KUR

No	Wilayah	Jumlah Responden	Rata-rata pengeluaran
1.	Tasikmadu	21	
2.	Jatimulyo	3	
3.	Kedungkandang	2	Rp. 3.146.640
4.	Buring	9	
5.	Sukun	29	

Sumber: Data Primer diolah 2018

Pada tabel hasil penelitian yang peneliti dapatkan, rata-rata pengeluaran pada 64 responden setelah menjadi nasabah KUR telah memiliki pengeluaran Rp.3.146.640 dimana kriteria ini termasuk indikator sejahtera. Saat peneliti wawancara kepada 64 responden, mereka menjawab bahwa pengeluaran mereka

dan peneliti simpulkan sudah tergolong sejahtera dimana memiliki kriteria sedang hingga tinggi.

Pengujian pada aplikasi SPSS:

Case Processing Summary						
	Cases					
	Included		Excluded		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
VAR00001	64	100,0%	0	0,0%	64	100,0%

Report		
VAR00001		
Mean	N	Std. Deviation
3146640,6250	64	1485582,57898

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
VAR00001	64	970000,00	6700000,00	3146640,6250	1485582,57898
Valid N (listwise)	64				

Nilai N menunjukkan jumlah responden sebanyak 64, dan nilai mean sebesar 3146640, yaitu rata-rata pengeluaran setelah mengambil KUR dengan nilai minimum 970000 dan maksimum 6700000 dan nilai valid responden sebesar 64. Standar deviasi menunjukkan dispersi rata-rata dari sampel.

Tabel 36. Perbedaan Plafon dan Pengeluaran

No	Plafon (Bulan)	Pengeluaran
1.	12	Meningkat non pangan
2.	24	Meningkat non pangan
3.	36	Meningkat non pangan

Sumber: Data Primer diolah 2018

Pada tabel hasil penelitian yang peneliti dapatkan, pengeluaran pada 64 responden yang menjadi nasabah KUR dan perbedaan plafon yang diambil adalah meningkatnya pengeluaran pangan maupun non pangan dengan nilai persentase yang berbeda, dimana kriteria ini termasuk indikator sejahtera. Saat peneliti

wawancara kepada 64 responden, mereka menjawab dan peneliti simpulkan bahwa dari pengeluaran mereka dan dibandingkan dengan pendapatan mereka sudah tergolong sejahtera. Responden memiliki pengeluaran yang termasuk sedang hingga tinggi seperti yang dijelaskan oleh Bappenas. Nasabah yang mengambil plafon 12 bulan adalah nasabah yang baru saja memulai pengambilan KUR 1 tahun awal yang merupakan petani Tasikmadu, Buring, Dan Kedungkandang. Pada tingkat plafon 24 adalah para pedagang Jatimulyo dan sebagian pedagang kecamatan Sukun yang telah memiliki pengalaman kredit 36 bulan dan peningkatan tempat tinggalnya jauh lebih maju dibandingkan yang mengambil 12 bulan dan 24 bulan. Alasan ini dikarenakan bahwa semakin mengambil KUR dengan jangka waktu yang lama/ dana KUR yang banyak maka peningkatan modal akan memberikan peningkatan pengeluaran yang banyak pula. Maka untuk melihat pengaruh dari modal KUR yang diberikan oleh BNI apakah berpengaruh terhadap rata-rata pengeluaran sebelum dan sesudah mendapatkan KUR. Berdasarkan pengujian rata-rata 64 nasabah dengan nilai setelah mendapatkan KUR Rp.3.146.640 dan sebelum mendapatkan KUR sebesar Rp.2.660.703. Hasil penelitian sesuai dengan hipotesis yang diajukan, maka hipotesis penelitian diterima. Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hendrik (2011), menunjukkan bahwa pengeluaran berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kesejahteraan keluarga, begitu juga menurut Wagle et al, (2006) bahwa secara langsung konsumsi yang berasal dari pendapatan akan mempengaruhi kesejahteraan, dengan demikian penelitian ini dapat diterima karena sesuai dengan teori yang ada.

3. Tempat Tinggal

Berdasarkan hasil penelitian dari 64 nasabah sebagai sampel dari petani di Kota Malang diperoleh hasil bahwa indikator tempat tinggal sebelum dan sesudah menerima KUR masih tetap sama dan tergolong sejahtera. Atap terbuat dari genteng, dinding dari batako dan lantai dari keramik. Karena pada dasarnya nasabah dalam kelengkapan berkas harus telah memiliki agunan dan dapat dipercaya validitas untuk pelunasannya maka dari itu nasabah sudah memiliki indikator sejahtera dalam tempat tinggal sebagai nasabah BNI. Indikator tempat tinggal yang dinilai ada 5 item yaitu jenis atap rumah, dinding, status kepemilikan

rumah, lantai dan luas lantai. Pada penelitian ini, Para petani/ nasabah yang mengambil KUR di Kota Malang keadaan tempat tinggalnya adalah permanen. Kriteria permanen ditentukan oleh kualitas dinding, atap dan lantai. Bangunan rumah permanen para nasabah adalah rumah yang dindingnya terbuat dari tembok kualitas tinggi, lantai terbuat dari ubin/keramik kualitas tinggi dan atapnya terbuat dari genteng dan seng.

Tabel 37. Tempat Tinggal Responden Sebelum Menerima KUR

No	Wilayah	Jumlah Responden	Atap	Dinding	Lantai	Indikator
1.	Tasikmadu	21	Genteng	Tembok/bata	Keramik/ubin	Sejahtera
2.	Jatimulyo	3	Genteng	Tembok/bata	Keramik/ubin	Sejahtera
3.	Kedungkandang	2	Genteng	Tembok/bata	Keramik/ubin	Sejahtera
4.	Buring	9	Genteng	Tembok/bata	Keramik/ubin	Sejahtera
5.	Sukun	29	Genteng	Tembok/bata	Keramik/ubin	Sejahtera

Sumber: Data Primer diolah 2018

Pada tabel hasil penelitian yang peneliti dapatkan, tempat tinggal pada 64 responden sebelum menjadi nasabah KUR telah memiliki atap yang berupa genteng, dengan dinding tembok/bata dan lantai yang merupakan keramik/ubin, dimana kriteria ini termasuk indikator sejahtera. Saat peneliti wawancara kepada 64 responden, mereka menjawab bahwa rumah mereka sudah tergolong sejahtera dimana memiliki status kepemilikan permanen seperti yang dijelaskan oleh Bappenas.

Tabel 38. Tempat Tinggal Responden Setelah Menerima KUR

No	Wilayah	Jumlah Responden	Atap	Dinding	Lantai	Indikator
1.	Tasikmadu	21	Genteng	Tembok/bata	Keramik/ubin	Sejahtera
2.	Jatimulyo	3	Genteng	Tembok/bata	Keramik/ubin	Sejahtera
3.	Kedungkandang	2	Genteng	Tembok/bata	Keramik/ubin	Sejahtera
4.	Buring	9	Genteng	Tembok/bata	Keramik/ubin	Sejahtera
5.	Sukun	29	Genteng	Tembok/bata	Keramik/ubin	Sejahtera

Sumber: Data Primer diolah 2018

Pada tabel hasil penelitian yang peneliti dapatkan, tempat tinggal pada 64 responden setelah menjadi nasabah KUR telah memiliki atap yang berupa genteng, dengan dinding tembok/bata dan lantai yang merupakan keramik/ubin, dimana kriteria ini termasuk indikator sejahtera. Saat peneliti wawancara kepada 64 responden, mereka menjawab bahwa rumah mereka sudah tergolong sejahtera dimana memiliki status kepemilikan permanen seperti yang dijelaskan oleh Bappenas.

Tabel 39. Perbedaan Plafon dan Peningkatan Tempat Tinggal

No	Plafon (Bulan)	Tempat Tinggal
1.	12	Meningkat Lantai
2.	24	Meningkat Tembok/Bata
3.	36	Meningkat Tembok/Bata

Sumber: Data Primer diolah 2018

Pada tabel hasil penelitian yang peneliti dapatkan, tempat tinggal pada 64 responden yang menjadi nasabah KUR dan perbedaan plafon yang diambil adalah meningkatnya luas rumah dan struktur bangunan seperti menambah dan menghias *design* rumah lainnya yaitu meningkat lantai keramik, meningkatnya tembok, dimana kriteria ini termasuk indikator sejahtera. Saat peneliti wawancara kepada 64 responden, mereka menjawab dan peneliti simpulkan bahwa rumah mereka sudah tergolong sejahtera dimana memiliki status kepemilikan permanen seperti yang dijelaskan oleh Bappenas. Berikut penuturannya:

“Bisa renovasi rumah karena ambil KUR, modalnya dari KUR jadi bisa meningkat pendapatannya” (Nasabah Sukun, 2018).

Nasabah yang mengambil plafon 12 bulan adalah nasabah yang baru saja memulai pengambilan KUR 1 tahun awal yang merupakan petani Tasikmadu, Buring, dan Kedungkandang. Pada tingkat plafon 24 adalah para pedagang Jatimulyo dan sebagian pedagang kecamatan Sukun yang telah memiliki pengalaman kredit 36 bulan dan peningkatan tempat tinggalnya jauh lebih maju dibandingkan yang mengambil 12 bulan dan 24 bulan. Responden lainnya juga diminta penuturannya. Berikut penuturannya:

“Ambil KUR sudah 2 tahun, dari KUR dapet modal bisa nambah jualan. Jadi, bisa ganti keramik ganti cat” (Nasabah Kedungkandang,2018).

Alasan ini dikarenakan bahwa semakin mengambil KUR dengan jangka waktu yang lama/ dana KUR yang banyak maka peningkatan modal akan memberikan peningkatan pendapatan juga dimana otomatis akan memberikan peningkatan terhadap tempat tinggal.

Tabel 40. Listrik, Air, dan MCK Responden sebelum mengambil KUR

No	Wilayah	Listrik	Sumber Air	MCK
1.	Tasikmadu		Ledeng	WC
2.	Jatimulyo		Ledeng	WC
3.	Kedungkandang	642 W	Ledeng	WC
4.	Buring		Ledeng	WC
5.	Sukun		Ledeng	WC

Hasil dari penelitian ini, pada 5 kecamatan daya listrik yang digunakan sebelum mengambil KUR rata-rata 642 W.

Pengujian Rata-rata sebelum mengambil KUR melalui aplikasi SPSS:

Case Processing Summary						
	Cases					
	Included		Excluded		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
VAR00001	64	100,0%	0	0,0%	64	100,0%

Report		
VAR00001		
Mean	N	Std. Deviation
642,5000	64	248,60883

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
VAR00001	64	250,00	1250,00	642,5000	248,60883
Valid N (listwise)	64				

Nilai N menunjukkan jumlah responden sebanyak 64, dan nilai mean sebesar 642, yaitu rata-rata penggunaan daya listrik setelah mengambil KUR dengan nilai minimum 250, dan maksimum 1250 dan nilai valid responden sebesar 64. Standar deviasi menunjukkan dispersi rata-rata dari sampel. Hasil dari penelitian ini, pada 5 kecamatan daya listrik yang digunakan sebelum mengambil KUR rata-rata sebesar 642 W.

Tabel 41. Listrik, Air, dan MCK Responden setelah mengambil KUR

No	Wilayah	Listrik	Sumber Air	MCK
1.	Tasikmadu		Ledeng	WC
2.	Jatimulyo		Ledeng	WC
3.	Kedungkandang	976 W	Ledeng	WC
4.	Buring		Ledeng	WC
5.	Sukun		Ledeng	WC

Pengujian rata-rata setelah mengambil KUR melalui aplikasi SPSS:

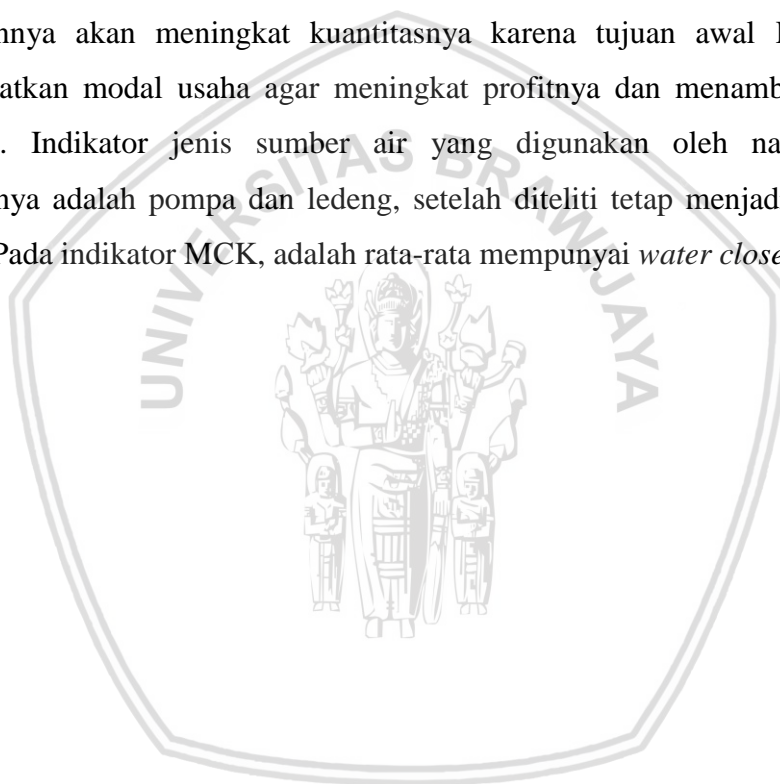
Case Processing Summary						
	Cases					
	Included		Excluded		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
VAR00001	64	100,0%	0	0,0%	64	100,0%

Report		
VAR00001		
Mean	N	Std. Deviation
976,4063	64	197,62372

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
VAR00001	64	550,00	1500,00	976,4063	197,62372
Valid N (listwise)	64				

Nilai N menunjukkan jumlah responden sebanyak 64, dan nilai mean sebesar 976, yaitu rata-rata penggunaan daya listrik setelah mengambil KUR dengan nilai minimum 550, dan maksimum 1500 dan nilai valid responden sebesar 64. Standar deviasi menunjukkan dispersi rata-rata dari sampel. Hasil dari penelitian ini, pada 5 kecamatan daya listrik yang digunakan setelah mengambil KUR rata-rata meningkat menjadi 976 W.

Hasil dari penjelasan tabel di atas adalah peningkatan listrik yang meningkat pada 64 responden setelah mengambil KUR karena diikuti dengan peningkatan pendapatan pula. Seluruh kegiatan produksi yang telah dimodali keuangannya akan meningkat kuantitasnya karena tujuan awal KUR adalah meningkatkan modal usaha agar meningkat profitnya dan menambah kuantitas produksi. Indikator jenis sumber air yang digunakan oleh nasabah KUR sebelumnya adalah pompa dan ledeng, setelah diteliti tetap menjadi ledeng dan pompa. Pada indikator MCK, adalah rata-rata mempunyai *water closet* sendiri.



BAB VI. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BNI Kota Malang adalah penambahan modal bagi usaha dengan golongan mikro, kecil dan menengah. Berikut ini adalah kesimpulan mengenai KUR Mikro pada BNI Kota Malang. Adapun prosedur-prosedur yang dilakukan BNI Kota Malang mengenai KUR Mikro adalah :

1. Prosedur Permohonan Kredit Oleh Calon Debitur, dan syarat-syaratnya adalah fotokopi KTP, KK, Surat nikah, SIUP, NPWP.
2. Prosedur Penyelidikan dan syarat-syaratnya adalah wawancara, pengumpulan data intern dan ekstern, penyelidikan 5C, penguraian dan pertimbangan.
3. Prosedur Persetujuan Permohonan Kredit dan syarat-syaratnya adalah pemeriksaan dokumen nasabah, pembuatan surat keputusan, dan pengikatan jaminan serta analisis faktor-faktor persetujuan KUR kepada nasabah.
4. Prosedur Pencairan Fasilitas Kredit Mikro dan syarat-syaratnya adalah acc pencairan pembuatan SPH dan penerimaan.
5. Prosedur Pelunasan Fasilitas Kredit Mikro dan syarat-syaratnya adalah rekapitulasi bunga, advance payed, rekalkulasi, dan pelunasan maju.

Kendala-kendala pada proses penyaluran KUR di Kota Malang terjadi di pihak petani yaitu prosedur yang masih rumit dan banyaknya syarat yang diberikan ke petani, dan petani yang masih dinilai sebagai usaha yang memiliki prospek rendah. Pada pihak Bankir yaitu sulitnya menjangkau hingga pelosok, dan masih memiliki keterbatasan *monitoring*. pada mekanisme adalah adanya prosedur yang masih belum sesuai pedoman KUR BI dan kurangnya jaminan dari pemerintah.

Hasil perbedaan pada pendapatan yaitu sebelum mendapatkan KUR sebesar Rp.4.442.437 lalu naik menjadi Rp.5.426.812, pengeluaran sebelum mengambil KUR sebesar Rp.2.660.703 lalu naik menjadi Rp.3.146.640. Pada kebutuhan daya listrik rata-rata sebelum mengambil KUR sebesar 642 W menjadi 976 W, air berupa ledeng dan pompa, namun tidak berpengaruh pada tempat tinggal dan MCK. Menurut responden, KUR yang telah di programkan pemerintah sudah sangat membantu permodalan bagi usaha kecil dan menengah.

6.2 Saran

Saran bagi BNI Kota Malang adalah pendampingan bagi penerima KUR sangat penting dilihat dari calon penerima kredit yang rata-rata adalah petani yang kurang paham dengan istilah Bank. Dengan adanya pendampingan, pelaku usaha akan lebih berhasil mengajukan KUR jika didampingi hingga selesai pengembalian kredit.

Memperbaiki dan menyempurnakan aturan, menggencarkan sosialisasi KUR agar calon nasabah tidak mendapatkan informasi yang simpang siur, dibentuk Komite Kebijakan KUR di setiap daerah untuk menekan potensi penyimpangan program KUR. Agar tidak *overload*, selain 6 Bank pelaksana juga mempertimbangkan Bank-Bank swasta untuk diamanatkan program KUR. Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar penyesuaian suku bunga KUR BNI bisa diturunkan hingga satu digit saja. Selain itu Bank pemberi kredit bisa mengubah penilaian kelayakan usaha yang sebelumnya disamaratakan menjadi lebih disesuaikan dengan ukuran usahanya, karena tujuan sejak awal dari program KUR adalah membantu mengatasi kendala yang kerap dihadapi petani karena petani sangat strategis dalam peta perekonomian Indonesia dan melalui KUR BNI yang merupakan salah satu keberhasilan Indonesia untuk membuka sumber-sumber keuangan (*Financial Inclusion*) untuk semua orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, K dan Rilda. 2000. *Unsur-unsur kredit*. Jakarta: Rajawali Press
- Anggraini, D dan Syahrir, H. N. 2013. *Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM di Kota Medan (Studi Kasus Bank Rakyat Indonesia)*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol.I No.3 Februari 2013. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Ardiyos, Putri. 2004, *Kamus Besar Akuntansi*, Bandung : Alfabetis
- Arief, B dan Rosmiati, M. 2010. *Dampak Akses Kredit Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Padi*. Jurnal. Institute Koperasi Indonesia. Jakarta.
- Arikunto, S. 2002. *Metodelogi Penelitian*. Bina Aksara. Yogyakarta.
- Arthur Dunham. 1991. *Kesejahteraan Sosial: Sukoco*
- Bank Indonesia. 2013. *Data Penyaluran KUR di Indonesia*. Diakses pada KUR. Ekon.go.id 4 Januari 2018
- Bank Indonesia. 2016. *Peraturan Bank Indonesia No 6/10/PBI/2004 Tanggal 12 April 2004*. Diambil kembali dari Perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum: www.bi.go.id.
- Bank Indonesia. 17/12/pbi/2015. *Peraturan KUR*. Jakarta dalam situs http://www.bi.go.id/id/peraturan/ssk/Documents/pbi_171215.pdf. Diakses 1 Maret 2018
- Badan Pusat Statistik. 2011. *Kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. Badan Pustaka Statistik. Jakarta: Biro Pusat Statistik diakses 5 Januari 2018
- Badan Pusat Statistik. 2014. *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2007*. Badan Pusat Statistik. Jakarta: Biro Pusat Statistik diakses 2 Maret 2018
- Badan Pusat Statistik. 2007. *Statistik Usaha Kecil dan Menengah*. Jakarta: Biro Pusat Statistik diakses 2 Februari 2018
- Bappenas 2000. *Status Kesejahteraan*. Diakses kembali dari Bappenas Tanggal 1 Maret 2018.
- Bungin. 2008. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- BKKBN. 1992. *Pembangunan Keluarga Sejahtera*. Jakarta: BKKBN
- Dahlan Siamat. 1995. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Intermedia

- Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi. (2016). *Buku Panduan Tugas Akhir*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Departemen pengembangan akses keuangan dan UMKM 2017. *NET ekspansi..*
<https://www.bi.go.id/id/umkm/klaster/profil-umkm>. Diakses 20 Januari 2018
- Dinas Pertanian Kota Malang. 2018. *Ukuran lahan di Kota Malang saat ini*. Dalam situs Dinas Pertanian Kota Malang. Diakses 12 Maret 2018
- Edinho Ikhtisar Hutagol. 2013. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor agribisnis*. skripsi: BRI Cigombong
- Effendi, L. 2009. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Nasabah pada Bank Muamalat Malang*. Skripsi. Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Malang.
- Ellis. 1992. *Agricultural Policies in Developing Countries*. Cambridge: University of Cambridge
- Friedlander, Sukoco. 1991. *Introduction to Social Welfare*. Prentice hall inc Newyork
- Firdaus, Arianti. 2004. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta
- Gusti, I. A. A. S. P dan Nyoman, I.A S. 2010. *Efektivitas Dan Dampak Program Bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan Dan Kesempatan Kerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Denpasar*. Jurnal Ekonomi Pertanian Universitas Udayana Volume 2(10). Universitas Udayana. Bali.
- Hasibuan. M. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bina Aksara. Jakarta
- Habibi, Indra Resqi. 2014. *Analisis Dampak Pemberian Kredit Lembaga Keuangan Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Kota Tarakan*. Skripsi. Fakultas Borneo Tarakan.
- Hastuti. 2004. *Aksesibilitas masyarakat terhadap kelembagaan pembiayaan pertanian di pedesaan*. ICASERD working paper No. 57. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor hlm 14

- Hastuti, supadi. 2001. *Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Kelembagaan Pembiayaan Pertanian Di Pedesaan*. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Departemen Pertanian Bogor.
- Hazarik, alwang. 2003. *Access To Credit, Plot Size And Cost Inefficiency Among Smollholder Tobacco Cultivators In Malawi*. *Agricultural Economics* 29(1):99-109
- Hendrik. 2011. *Analisis Pendapatan Dan Tingkat Kesejahteraan Nelayan Danau Pulau Besar Dan Danau Bawah Di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Propinsi Riau*. *Jurnal Perikanan Dan Kelautan* 16,1: 21-32
- Hermanto. 2005. *Ilmu Usaha Tani*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Himpunan Bank Milik Negara. 2017. *Penyaluran kredit usaha rakyat*. Dalam situs <http://m.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/03/29/p6crin377-bank-bumn-salurkan-kur-untuk-petani>. Diakses 13 Maret 2018
- Hubeis.2009. *Permasalahan UMKM*. Bogor: Ghalia Indonesia
- James, K. dan Akrasanee, N. (1988). *Small and Medium Business Improvement in The Asean Region*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Kadarsan, H.W. 1995. *Keuangan Pertanian dan Pembiayaan Perusahaan Agribisnis*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kasmir. 2012. *Dasar-dasar Perbankan edisi revisi*. Rajagrafindo persada. Jakarta
- KUR Indonesia 2017. *Data Penyaluran KUR di Indonesia*. Diakses 12 Januari 2018.
- Kasmir. 2005. *Jenis-jenis kredit*. Jakarta: Rajawali Press
- Kasmir. 2007. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. *Narasi Statistik UMKM 2010- 2011*. <http://www.depko.go.id>. diakses pada tanggal 3 Maret 2018.
- Keputusan Presiden. 2015. *Perubahan pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta
- Komite kebijakan KUR. 2014. *Workshop Evaluasi*. Jakarta
- Linda Mega Sari. 2011. *Sistem pemberian kredit oleh BRI*. Skripsi.

- Marcellina, Ayu Linda. 2012. *Analisis Dampak Kredit Mikro Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Di Kota Semarang*. Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Mangkuprawira, S. 1996. *Hubungan Kelembagaan dalam Agribisnis*. Jurnal Volume 2 No. 2 September 1996. IPB Press. Bogor.
- Maria, A dan Rachmina, D. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi dan Pengembalian Kredit Usaha Rakyat*. Jurnal Volume 1 No 2. Forum Agribisnis Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Menteri Keuangan. 2015. *Besaran Subsidi Bunga KUR*. 1355/KMK.05/2015
- Menteri Keuangan. 2008. *Peraturan Menteri Keuangan No.135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat tanggal 24 September 2008*
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 2015. *Bank Pelaksana dan Perusahaan penjamin KUR*. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- Menteri Perekonomian. 2015. *Pedoman Pelaksanaan KUR*. Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
- Miles . Huberman. 1984. *Analisis data kualitatif*. Terjemahan oleh Tjejep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta: Universitas Indonesia
- Mosher 1987. *Menggerakkan dan Membangun Pertanian*. Jakarta: Yasaguna
- Nafarin, M. 2004. *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- NN. *Akselerasi Pembiayaan UMKM*. (<http://www.kompas.com>) (17 Januari 2018 pukul 22.00)
- NN. *Kesimpulan Fokus Group Discussion Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro*. (<http://www.ukm-center.org>) (23 Februari 2018 pukul 21.00)
- NN. *KUR BRI*. (<http://www.bri.co.id>) (23 April 2018 pukul 21.00)
- NN. *Jenis-jenis KUR*. (<http://www.kredit-usaha-rakyat.co.cc>) (23 januari 2018 pukul 21.00)
- Nizar, Rini. (2004). *Analisis Permintaan dan Pengembalian Kredit Usahatani oleh Rumahtangga Petani Padi di Sumatera Barat*. Tesis Magister Sains. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor. (unpublished).

- Nurul Wardhani. 2013. Skripsi. *Pelaksanaan pemberian KUR BRI Unit gombang* Permenko. Permenko No.6 tahun 2015. *Pedoman Pelaksanaan KUR*.
- PMK. Pasal 8 Keppres Nomor 14 Tahun 2015. *Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM*.
- Pusat Pembiayaan Pertanian. *Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*. Dalam <https://www.bi.go.id/id/umkm/klaster/profil-umkm>. Vol.27 No. 1 Juli 2009.
- Rambe 2004. *Alokasi Pengeluaran Rumah Tangga Dan Tingkat Kesejahteraan (Kasus Di Medan Sumatera Utara*. Tesis. Sekolah Pascasarjana IPB. Bogor
- Retnadi D. 2006. *Memilih Bank yang Sehat, Kenali Kinerja dan Pelayanannya*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo. Kelompok Gramedia.
- Sarah, S. 2011. *Analisis Pendapatan dan Tingkat Kesejahteraan rumah Tangga Petani Sayuran Di Kota Bandar Lampung*. Skripsi. Fakultas Pertanian. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Sajogyo, 1997. *Kesejahteraan Rumah Tangga*. LPSB-IPB
- Simatupang, rahmat. 1989. *Pengaruh Kredit Ketahanan Pangan Terhadap Efisiensi Usahatani*. Skripsi. IPB
- Suyanto. 2014. Penelitian Kualitatif. Klaten: Bosscript
- Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian*. Surakarta : UNS Press
- Teguh Pudjo Muljono. 1990. *Pengertian Kredit*. Analisis laporan keuangan untuk perbankan. Jakarta: Djambatan
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan*.
- UU nomor 11 tahun 2009. *Kesejahteraan Masyarakat*. Diakses dari UU Indonesia 15 Februari 2018
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008. *Kredit Usaha Rakyat*. Jakarta. 2008
- Wangi SP. 2008. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Pengajuan Kredit di Bank "X"(studi kasus: Wilayah Bandung)* Skripsi. Bogor: Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
- Wagle et al 2006

- Wahyu K. 2012. *Faktor penyalahgunaan KUR*. Skripsi. Institut Pertanian Bogor
- Yessy. 2015. *Pembiayaan Kartu Tani*. Malang. diakses dari Kompas 12 Januari 2018

